

SKRIPSI
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN
BIREUEN



Disusun Oleh:

MARISA SAPUTRI
NIM. 170604094

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Marisa Saputri
NIM : 170604094
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya tulis orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - R A N I R Y Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Marisa Saputri

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Bireuen

Disusun Oleh:

Marisa Saputri
NIM. 170604094

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
NIP. 19720481999031005

Rachmi Meutia, M.Sc.
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi


Cut Dian Fitri., M.Si., Ak
NIP. 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bireuen

Marisa Saputri
NIM. 170604094

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 H
26 Jumadil Awal 1444 M

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
NIP. 19720481999031005

Ana Fitria, S.E., M.Sc.
NIP. 199009052019032019

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Zuhilmi
NIP. 19720428200501103

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197009171997031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 19800625200911009



MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Marisa Saputri
NIM : 170604094
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
E-mail : 170604094@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bireuen

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Desember 2022

Mengetahui

Penulis

Marisa Saputri
NIM. 70604094

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 19720481999031005

Pembimbing II

Ana Fitria, S.E., M.Sc.
NIP. 199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul penelitian “**Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Bireuen**”.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ana Fitria, M.Sc. selaku Sekretaris

- program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana S.P., SHI.,M.E selaku Ketua Laboratorimum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I dan Rachmi Meutia, M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 5. Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., M.A. selaku penguji I dan Dr. Maimun, S.E., Ak.,M.Si. selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu dalam Sidang Munaqasyah saya pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 6. Yulindawati S.E.,M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatian yang sangat luar biasa kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata (S1) Ilmu Ekonomi.

7. Kepada Badan Pusat Statistik Bireuen dan Aceh yang telah menyediakan data di Website BPS sangat membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Ayah saya tercinta Ridwan M. Saleh, Ibu saya tercinta Marlina M. Nur, Adik-Adik saya dan Keluarga Besar yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu, arahan, dan doa, serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.
9. Kepada kawan-kawan seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2017, dan sahabat-sahabat terbaik saya Nanda Sari, Siti Rahma Tilla, Nurul Ala, Jehan Maulana, yang selalu ada dan setia membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Desember 2022

Penulis ,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Marisa Saputri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

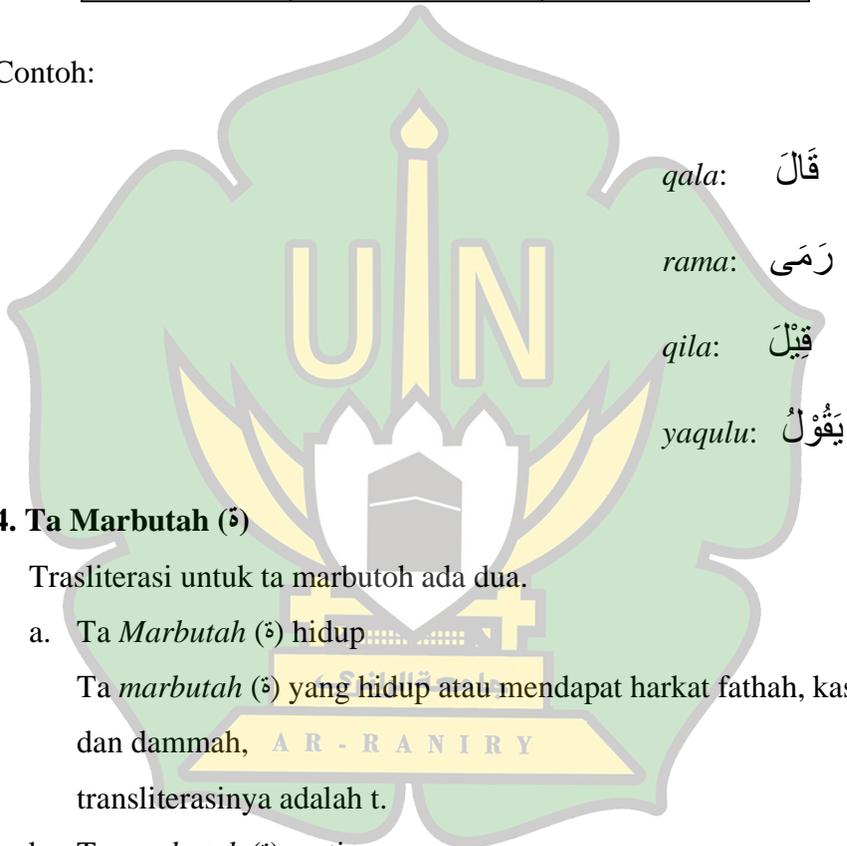
Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِي	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يِي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:



qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Marisa Saputri
NIM : 170604094
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bireuen
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE.,M.Si
Pembimbing II: Rachmi Meutia, M.Sc

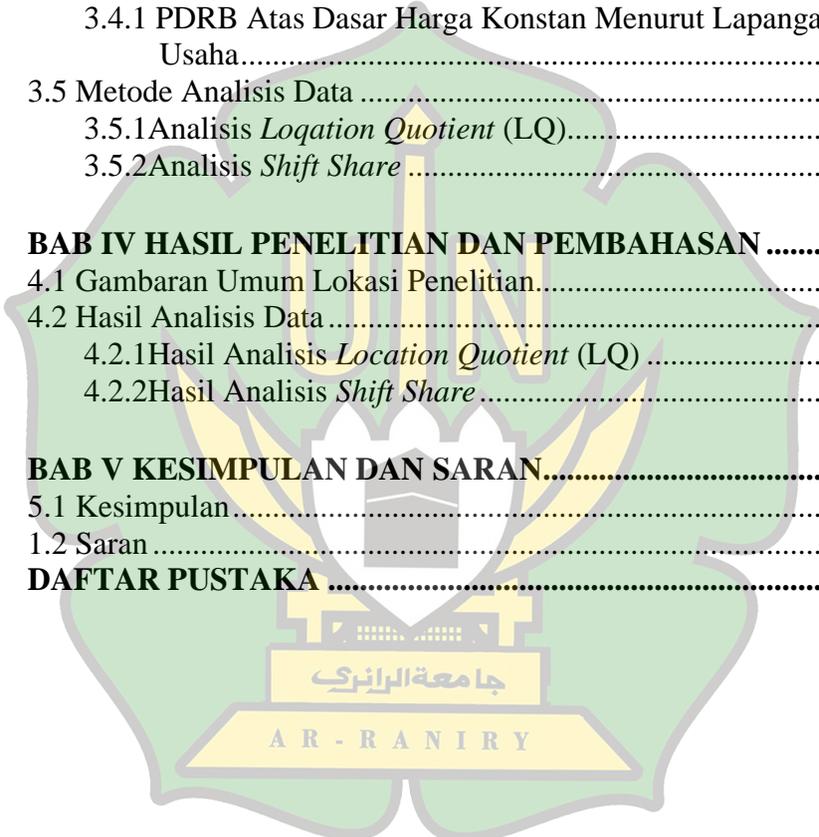
Salah satu strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi basis dalam program pembangunan yang direncanakan untuk mengarah pada kinerja perekonomian yang lebih baik secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor non unggulan serta untuk mengetahui bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di daerah Kabupaten Bireuen. Data dalam penelitian ini berasal dari BPS menggunakan data sekunder berupa *time series* dari PDRB Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan alat analisis yang digunakan yaitu: 1). Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis (sektor unggulan) dan non basis (non unggulan) dalam perekonomian Kabupaten Bireuen. 2). Analisis *Shift Share* (SS) digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Bireuen. Berdasarkan analisis LQ, sektor basis Kabupaten Bireuen terdapat empat sektor, yaitu: sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor Perdagangan besar dan eceran, serta sektor Transportasi dan pergudangan. Hasil analisis SS semua sektor positif, yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Kata Kunci: *PDRB, Sektor Unggulan, Location Quotient, Shift Share*

DAFTAR ISI

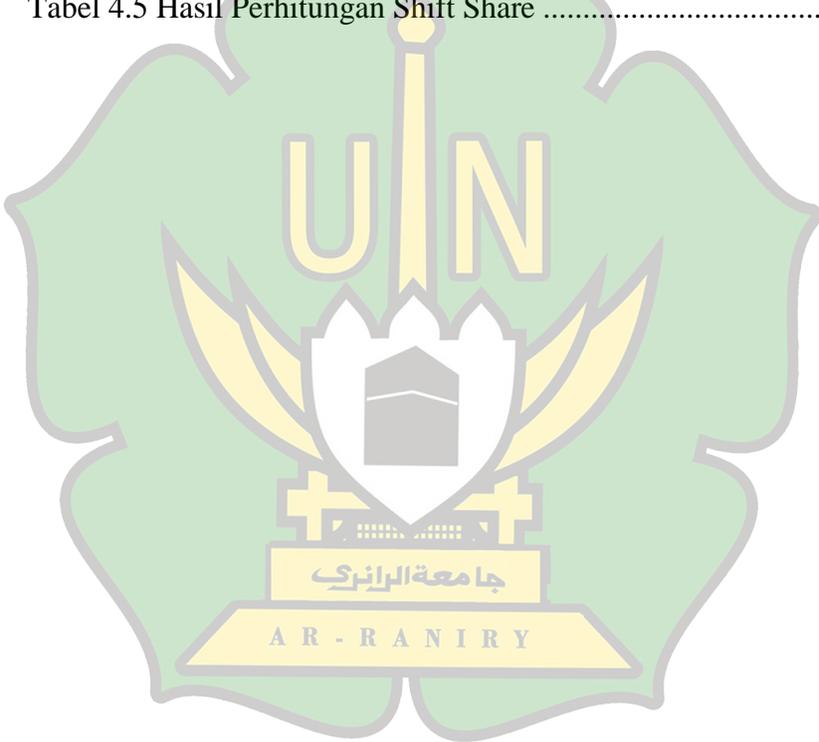
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xixx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Konsep Wilayah	15
2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah	16
2.2.1 Teori Basis Ekonomi	18
2.2.2 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	20
2.2.3 Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	21
2.3 Teori Sektor (<i>Sector Theory of Growth</i>).....	22
2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	25
2.4.1 Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah	28
2.5 Sektor Unggulan	31
2.6 Pendapatan Daerah	38
2.6.1 Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	39
2.6.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	40
2.7 Penelitian Terkait.....	43
2.8 Kerangka Berpikir	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Rancangan Penelitian	47
3.2 Sample Penelitian	47
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	47
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable	48
3.4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	48
3.5 Metode Analisis Data	50
3.5.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	51
3.5.2 Analisis <i>Shift Share</i>	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.2 Hasil Analisis Data	59
4.2.1 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	59
4.2.2 Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
1.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju pertumbuhan Kabupaten Bireuen ADHK 2010	8
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	44
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Location Quotien Tahun 2017-2021.	61
Tabel 4.2 Perhitungan National Share	68
Tabel 4.3 Perhitungan Proportional Share.....	70
Tabel 4.4 Perhitungan Differential Shift	73
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Shift Share	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bireuen	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB Kabupaten Bireuen ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021	86
Lampiran 2 PDRB Provinsi Aceh ADHK 2010, menurut lapangan usaha (milyar rupiah), 2017-2021	87
Lampiran 3 hasil analisis <i>Location quotient</i> tahun 2017	89
Lampiran 4 hasil analisis <i>location quotient</i> tahun 2018	91
Lampiran 5 hasil analisis <i>location quotient</i> 2019	93
Lampiran 6 hasil analisis <i>location quotient</i> tahun 2020	95
Lampiran 7 hasil analisis <i>location quotient</i> tahun 2021	97
Lampiran 8 perhitungan <i>National Share</i>	99
Lampiran 9 perhitungan <i>Proportional Share</i>	101
Lampiran 10 perhitungan <i>Differential Shift</i>	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, menghadapi pandemi virus *Corona*. *Pandemic* COVID-19 mengancam sistem atau tatanan kehidupan masyarakat di segala bidang, salah satunya bidang ekonomi. *Pandemic* COVID-19 telah menimbulkan gejolak ekonomi yang berdampak secara global di mana ekonomi akan mengalami penurunan. Kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19, antara lain: industri pengolahan terkontraksi 6,19%, perdagangan terkontraksi 7,57%, konstruksi terkontraksi 5,39%, akomodasi dan makan minum terkontraksi 22,02%. Penanganan pandemi COVID-19 ikut mendorong perbaikan ekonomi domestik serta mampu menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk terus memperkuat strategi pengendalian COVID-19 agar segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor Produk Domestik Bruto terbesar nasional. Hal ini tercermin dari *purchasing managers index* yang mencapai 53,7%, yang ditopang oleh kuatnya kinerja ekspor dan membaiknya permintaan domestik. Hingga saat ini, lapangan usaha yang masih bias untuk tumbuh positif adalah sektor pertanian, informasi komunikasi, jasa kesehatan dan pengadaan air (Kemenkeu, 2022).

Sjafrizal (2012) mengatakan, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi

dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan keadaan demografi pada masing-masing wilayah. Karena perbedaan tersebut, ada wilayah yang cenderung lebih maju (*developed region*) dan wilayah yang cenderung tertinggal (*underdeveloped region*). Hasil studi yang dilakukan oleh Esmara (1986) dan diperkuat oleh Uppal, J.S. & Handoko (1986) bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, bahkan di antara sesama negara berkembang. Ketimpangan yang relatif meningkat akan menyebabkan kecemburuan sosial daerah tertinggal terhadap daerah maju, sehingga dapat mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Menurut Sjafrizal (2012), ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah yaitu: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi yang sangat tinggi di beberapa wilayah, serta tidak meratanya alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Pada dasarnya proses pembangunan bukanlah sekedar fenomena ekonomi, pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai oleh suatu negara, akan tetapi pembangunan memiliki perspektif yang lebih luas. Kebijakan pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat,

menjamin tersedianya lapangan kerja dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dibidang kehidupan lainnya. Dengan melakukan beberapa kebijakan guna menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perekonomian. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, hal tersebut dikarenakan masing-masing daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, dengan memahami kondisi masyarakatnya pemerintah harus benar-benar paham permasalahan apa saja yang sedang terjadi dan perlu dibenahi, maka dari itu diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tercapainya pembangunan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas dari pemanfaatan sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Todaro & Smith (2011) pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, perubahan sikap masyarakat, lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam membangun daerah diperlukan adanya perencanaan yang baik. Pembangunan ekonomi bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga

kepada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti kepada sektor-sektor ekonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi tergambar pada pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara pusat pembangunan dan pusat pertumbuhan yaitu, pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang mampu mengembangkan sekumpulan kegiatan ekonomi lainnya. Pusat pembangunan adalah suatu kumpulan kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan struktur ekonomi maupun sosial dari dasar dan mampu mendorong proses pembangunan wilayah secara multidimensional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dan merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah suatu keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang berkembang termasuk Indonesia adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator perekonomian dari kinerja perekonomian suatu negara. Apabila pertumbuhan suatu negara positif maka dapat dikatakan keadaan perekonomian secara umum baik. Komponen pertumbuhan ekonomi

terdiri dari sektor-sektor ekonomi unggulan produktif yang menjadi ukuran. Salah satu strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi basis dalam program pembangunan yang direncanakan untuk mengarah pada kinerja perekonomian yang lebih baik secara keseluruhan. Sukirno (2015) menjelaskan, sektor ekonomi unggulan disebut sebagai sektor yang dapat di ekspor ke daerah lain karena kegiatan sektor unggulan menghasilkan produk dan jasa yang mendatangkan *profit* dari kegiatan ekspor tersebut. Tambunan (2001) sektor unggulan berkaitan dengan perbandingan mulai dari skala regional, nasional bahkan internasional. Pada lingkup nasional, suatu sektor dapat disebut sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dinilai dengan menganalisis data PDRB pada periode tertentu.

BPS (2021) menjelaskan ada 17 sektor ekonomi dari masing-masing daerah yang terdiri dari: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Pengalihan; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) *Real Estate*; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

(15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (17) Jasa Lainnya;. Sjafrizal (2017) mengatakan, di samping pembangunan fisik dan sosial, target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan wilayah saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat beragam, sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Kinerja perekonomian Aceh meningkat dilihat dari perkembangan riil PDRB ADHK dengan tahun dasar 2010 telah mencapai sebesar Rp131,59 triliun, naik sebesar Rp15,21 triliun dari tahun 2016. Sektor andalan provinsi Aceh adalah sektor Pertanian, peranan sektor Pertanian dalam perhitungan PDRB dengan kontribusi terbesar adalah subsektor Pertanian, subsektor peternakan dan subsektor perburuan dan jasa pertanian. Subsektor ini pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor unggulan selanjutnya adalah sektor kehutanan, dan perikanan dengan peranan sebesar 30,98 persen serta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kategori dengan peranan dua terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan peranan sebesar 14,79 persen. Berbeda dengan kategori pertanian, kategori ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2020. Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menempati urutan keempat dengan peranan

sebesar 10,26 persen pada tahun 2020, kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 4,67 persen pada tahun 2016 menjadi 4,46 persen pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan produksi pertambangan migas yang semakin menurun. Pada tahun 2020, dari 17 kategori lapangan usaha, 8 sektor di antaranya mengalami kontraksi sedangkan sisanya tumbuh positif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, merupakan sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan paling besar yaitu sebesar 28,44 persen. Sementara sektor informasi dan komunikasi serta sektor konstruksi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 11,98 persen dan 10,61 persen.

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota se-provinsi Aceh atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2017-2021, bahwa kontribusi PDRB kabupaten Bireuen masih terbilang rendah yaitu menempati urutan ke-16 se-provinsi Aceh adalah sebesar 0,94 persen. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian kabupaten Bireuen didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha di antaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; konstruksi; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Bireuen pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan dengan 609 desa yang memiliki potensi daerah yang berbeda-beda yang dapat menghasilkan suatu *output* ekonomi yang terlihat pada 17 sektor ekonomi yang ada di kabupaten Bireuen di bawah ini.

Tabel 1.1
Laju pertumbuhan Kabupaten Bireuen ADHK 2010

Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.36	2.72	4.30	3.87	-0.66
Pertambangan dan penggalian	-2.62	-6.13	1.38	2.96	7.06
Industri pengolahan	2.72	4.08	2.13	-2.93	0.71
Pengadaan listrik dan gas	9.01	9.53	9.95	7.66	3.64
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	9.54	7.82	20.59	0.74	2.30
Konstruksi	5.54	6.43	6.55	6.31	1.01
Perdagangan besar dan eceran	5.50	6.65	5.41	-4.97	4.55
Transportasi dan pergudangan	1.38	0.92	3.56	-21.21	25.19
Penyediaan akomodasi dan makan minum	6.10	6.35	7.36	-3.62	0.19
Informasi dan komunikasi	1.99	1.73	3.78	11.86	8.23
Jasa keuangan dan asuransi	4.43	1.10	8.60	2.77	-1.28
<i>Real estate</i>	5.38	5.43	6.74	-0.55	3.10
Jasa perusahaan	5.08	5.24	5.11	3.20	1.93

Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7.05	6.74	5.08	-0.13	5.20
Jasa Pendidikan	6.85	6.16	7.38	2.47	1.56
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7.12	6.91	7.14	6.01	9.83
Jasa lainnya	5.50	3.47	8.30	1.23	2.27
PDRB	4.23	4.22	5.00	-1.02	4.13

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2017-2021(Data diolah).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2021 laju pertumbuhannya paling rendah dan mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar 0,66 persen. Pada dasarnya, jika pemerintah kabupaten Bireuen memahami dengan benar potensi ekonomi apa yang dimiliki daerahnya dan dapat dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin PDRB kabupaten Bireuen dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bireuen dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi apa saja yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif. Sehingga pertumbuhan yang ada hanya sebatas pada angka-angka kuantitatif saja. Oleh karena itu, Kabupaten Bireuen memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Ada beberapa jenis metode analisis untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan dengan

pendekatan matematis dapat digunakan di suatu wilayah, di antaranya adalah Koefisien Lokasi (*Location Quotient* atau *LQ*), *Typologi Klassen* dan analisis *Shift Share*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* karena dengan dua alat analisis ini, akan semakin cepat menemukan potensi sektor unggulan di daerah yang ingin dikaji (Nur, 2021).

Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* bukanlah alat analisis baru, penelitian yang dilakukan oleh Nur (2021) untuk mengetahui sektor unggulan dan tidak unggul melalui data PDRB Kabupaten Bulungan, dengan menggunakan alat analisis *Shift Share*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu analisis *Shift Share* dan *Location Quotient*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irham (2020) yang bertujuan untuk menentukan sektor unggulan pada Kabupaten Bireuen yang dihitung dari PDRB Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh tahun 2005-2011 dengan menggunakan analisis model pertumbuhan rasio (*mrp*), *Shift Share* dan tipologi kassen. Hasil dari ketiga alat analisis tersebut menunjukan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor listrik dan air bersih merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bireuen.

Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Irham pada tahun 2020 dengan data PDRB ADHK tahun 2005-2011 di atas, maka perlu dilakukan analisis terbaru mengenai sektor unggulan atau sektor basis yang ada di Kabupaten Bireuen. Selain alasan untuk

perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen, pergantian tahun dasar dan pemecahan beberapa sektor dalam perhitungan PDRB juga menjadi alasan penting dalam melakukan penelitian ini. Untuk mencari sektor unggulan tidak hanya dilakukan melalui analisis *Location Quotient*, tetapi juga perlu dilakukan analisis shift share untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tarigan (2014) metode *LQ* merupakan suatu perbandingan antara peran sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan *mensupplay* kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Arsyad (2007) menjelaskan bahwa teknik *LQ* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu: (1) kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (*basis*), (2) kegiatan sektor ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (*non-basis*). Sjafrizal (2008) Metode *tipologi klassen* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing suatu wilayah. *Tipologi klassen* pada

dasarnya membagi wilayah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita. Analisis ini digunakan untuk penentuan sektor basis yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada sektor potensial (Suyanto, 2000). Analisis *Shift Share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode LQ (*location quotient*) dan metode SS (*shift-share*).

Berdasarkan teori-teori regional dan juga peraturan perundang-undangan otonomisasi daerah Nomor 32 Tahun 2004, bahwa yang menjalankan daerah dalam hal ini provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengelola potensi sumber daya daerah yang tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius untuk memahami sektor apa saja yang terus berkembang dan sektor apa saja yang mengalami kejenuhan. Dengan mengetahui sektor basis dan non basis dapat memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di kabupaten Bireuen, maka dapat membantu pemerintah dalam mengelola kebijakan dalam hal ekonomi dan pembangunan daerahnya sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi dan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bireuen adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Berdasarkan permasalahan- permasalahan di atas, maka

peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai potensi pertumbuhan ekonomi. Dengan judul “**Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Bireuen**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan adalah:

1. Sektor ekonomi manakah yang menjadi sektor basis dan non-basis perekonomian di Kabupaten Bireuen berdasarkan pendekatan *Location Quotient* ?
2. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Bireuen berdasarkan pendekatan *Shift Share* ?

1.3 Tujuan Penelitian

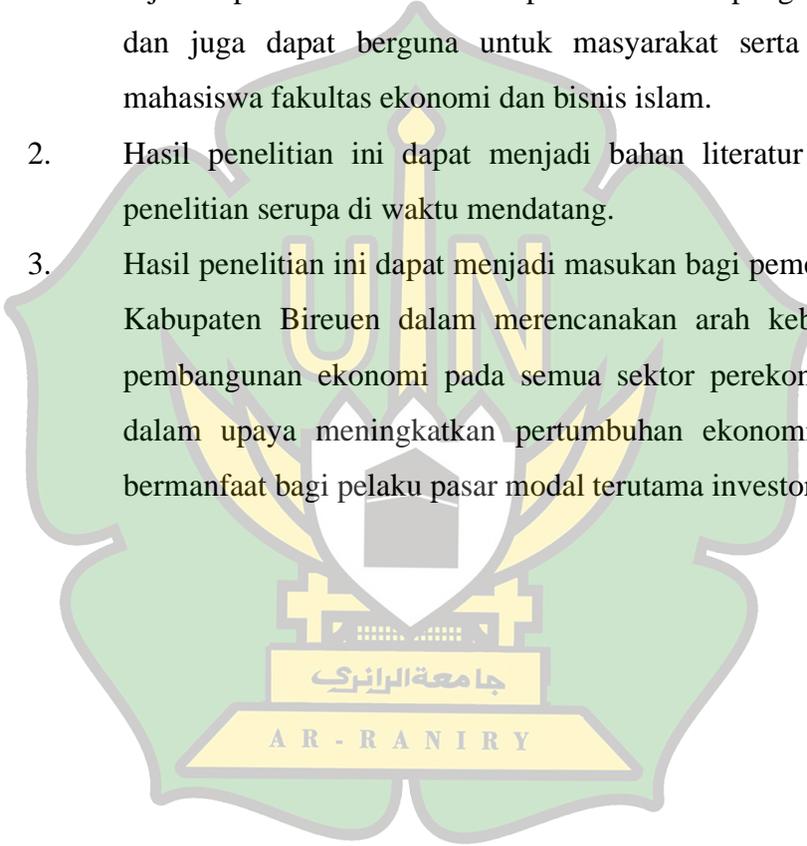
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Bireuen berdasarkan pendekatan *Location Quotient*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Bireuen berdasarkan pendekatan *Shift Share*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi dan potensi ekonomi serta mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh agar menjadi rujukan pustaka ekonomi dan perluasan ilmu pengetahuan dan juga dapat berguna untuk masyarakat serta untuk mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian serupa di waktu mendatang.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam merencanakan arah kebijakan pembangunan ekonomi pada semua sektor perekonomian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bermanfaat bagi pelaku pasar modal terutama investor.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Wilayah

Wilayah adalah suatu kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur yang terikat padanya yang dibatasi oleh aspek administratif atau aspek fungsional (Adisasmita, 2005). Dalam analisis ekonomi regional, ada beberapa konsep wilayah yang sering digunakan, yaitu:

- a) *Homogeneous Region* (wilayah homogen) adalah wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik (ciri) baik dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografi dan sebagainya. beberapa daerah dalam wilayah yang bersangkutan serta yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah: Provinsi, Kota, Kabupaten dan Desa.
- b) *Nodal Region* (wilayah nodal) yaitu suatu wilayah yang dibentuk dengan tujuan terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait yang dibentuk berdasarkan keterikatan sosial dan ekonomi yang erat antar daerah. Yang termasuk ke dalam wilayah nodal adalah: JABODETABEK (kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).
- c) *Planning Region* (wilayah perencanaan) adalah wilayah yang dibentuk untuk melakukan perencanaan pembangunan wilayah yang berada di bawah satu administrasi tertentu. Seperti: REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat menyeluruh, seimbang dan berkelanjutan yang mengakibatkan perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi ketimpangan daerah serta menghapuskan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Sirojuzilam, 2008). Tujuan dari pembangunan ekonomi ada dua tahap. Tahap pertama, pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, a pabila tujuan ini sudah terealisasikan, maka tahap kedua adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Sirojuzilam, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan kelembagaan baru, pengembangan *industry alternative*, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi dan pengembangan bisnis baru. Dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah utama terletak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (endogen), dan potensi pemanfaatan sumber daya manusia, sistem dan sumber daya material setempat. Orientasi ini

menyebabkan diadopsinya inisiatif dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Subandi, 2016). Tiga tujuan dari pembangunan ekonomi menurut (Todaro,2010):

- a) Perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan hak perlindungan keamanan.
- b) Meningkatkan standar hidup masyarakat yang tidak hanya sebatas peningkatan pendapatan, tetapi juga tersedianya lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas pendidikan serta meningkatkan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, untuk menumbuhkan harga diri pada setiap individu dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu masyarakat, yakni dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengelola sumberdaya yang ada dengan maksimal, orientasi ini mengarah kepada pengambilan kebijakan yang berasal dari daerah

tersebut dalam proses pembangunan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Hingga saat ini, belum ada satu teori mana pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting dari pembangunan ekonomi daerah. Pada dasarnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar antara dua hal, yaitu pembahasan tentang metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Lincoln 2002).

2.2.1 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berhubungan langsung dengan besarnya permintaan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis, akan tetapi hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan basis adalah kegiatan yang tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogen atau tidak dapat tumbuh bebas, artinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri dan

pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Lebih lanjut dalam analisis teori basis ekonomi, teori tersebut dapat digunakan sektor dan subsektor potensial di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila sektor potensial tersebut dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Menurut teori ini, suatu daerah dapat dibedakan menjadi daerah andalan dan bukan andalan, yang selanjutnya dimodifikasi menjadi sektor/subsektor ekonomi potensial dan bukan sektor/subsektor ekonomi potensial (Jumiyanti, 2018).

Sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (*service industries*), (Sjafrizal, 2008).

2.2.2 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap lembaga yang terkait dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran yang nantinya akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai:

- a. *Enterprenuer*, dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dalam lembaga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat mengembangkan usahanya sendiri. Semua aset pemerintahan daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
- b. Koordinator, sebagai koordinator pemerintah daerah dapat bertindak untuk menetapkan kebijakan, untuk mengusulkan strategi-strategi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, seperti kesempatan kerja, angkatan kerja dan pengangguran. Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, dunia usaha serta masyarakat dalam penyusunan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan

daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

- c. Fasilitator, dengan fungsi fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan mengenai perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Dengan ini, maka akan mempercepat proses pembangunan dan produser perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat memberikan stimulan penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke daerah tersebut dan menjaga perusahaan-perusahaan yang telah ada supaya tetap berada dan beroperasi di daerah tersebut. Hal ini bias dilakukan dengan cara pembangunan kawasan industri serta membantu industri kecil melakukan pameran (Arsyad, 2002).

2.2.3 Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pembangunan.

Beberapa peran swasta

dalam pembangunan, yaitu:

- a. *Development agent* (agen pembangunan), dalam hal ini sektor swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan di berbagai sektor yang bergerak di semua sektor, namun tidak termasuk sektor yang hanya dikuasai oleh sektor publik yang menyangkut kepentingan masyarakat umum.

- b. *Prime mover of development* (penggerak utama dari pembangunan), pihak swasta diharapkan mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja. Pihak swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja baru, selain yang ditawarkan oleh institusi pemerintahan.
- c. *Innovator and technological advancement*, diharapkan sektor swasta mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi tersebut kemudian diharapkan dapat mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien.
- d. *Partner*, sektor publik dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Diharapkan sektor swasta juga dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang sudah disediakan pemerintah (Beiq dkk, 2016).

2.3 Teori Sektor (*Sector Theory of Growth*)

Setiap wilayah mengalami perkembangan meliputi siklus jangka pendek dan jangka panjang. Dalam analisis jangka pendek pada umumnya digunakan faktor-faktor penduduk, tenaga kerja, upah, harga, teknologi dan distribusi penduduk, sedangkan laju pertumbuhan jangka panjang diukur menurut keluaran atau output dan pendapatan. Pada dasarnya pertumbuhan dapat terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor penentu yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan dan faktor-faktor diluar wilayah atau kombinasi

diantara kedua faktor tersebut. Teori sektor adalah teori pertumbuhan yang paling sederhana. Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan diikuti oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian yang menjadi sektor primer dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur dalam hal ini sektor sekunder, kemudian dalam industri jasa yang termasuk kedalam sektor tersier. Laju pertumbuhan yang mengalami perubahan (sektor *sift*) dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu daerah.

Penyebab Perubahan atau pergeseran yang terjadi pada sektor terkait dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan jasa yang di *supplay* oleh industri manufaktur atau industri jasa lebih tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer. Pendapatan yang meningkat akan diikuti oleh perpindahan sumber daya dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor jasa. Dari sisi penawaran, yaitu realokasi sumber daya tenaga kerja dan modal dilakukan sebagai akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor sekunder dan tersier menikmati kemajuan yang lebih besar dalam tingkat produktivitas. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas yang lebih cepat, karena produktivitas yang lebih tinggi dapat memungkinkan untuk melakukan realokasi sumber daya. Tingkat pertumbuhan produktivitas tergantung pada inovasi dan kemajuan teknik ataupun

skala ekonomi. Jika produktivitas lebih tinggi dalam industri-industri, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat cepat, maka terdapat kausalitas “produktivitas-harga rendah-permintaan bertambah luas”, bukan sebaliknya.

Terjadinya perubahan dan pergeseran sektor serta evaluasi spesialisasi atau pembagian kerja dipandang sebagai sumber dinamika pertumbuhan wilayah. Suatu perluasan dari teori sektor ini adalah teori tahapan yang menjelaskan bahwa perkembangan wilayah merupakan proses evolusioner internal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan perekonomian sub sistem swasembada dimana hanya terdapat sedikit investasi dan perdagangan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.
- b. Untuk mendorong perdagangan dan spesialisasi maka harus ada kemajuan transportasi di daerah yang bersangkutan. Industri pedesaan masih relatif sederhana atau tradisional untuk memenuhi kebutuhan kerja para petani.
- c. Jika bertambah majunya perdagangan antar wilayah, maka wilayah yang maju akan memprioritaskan pada pengembangan sub sektor tanaman pangan, lalu diikuti oleh sub sektor-sektor peternakan dan perikanan.
- d. Harus ada perkembangan di industri sekunder, pada permulaan pengolahan produk-produk primer, kemudian diperluas dan semakin berspesialisasi.

- e. Pengembangan industri tersier yang melayani permintaan dalam wilayah maupun diluar wilayah.

2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah yang bersangkutan, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya di tentukan dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari kurun waktu sekarang ke kurun waktu berikutnya, maka perhitungan pendapatan harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya harus dinyatakan dalam harga konstan. Badan Pusat Statistik dalam mempublikasikan laporan pendapatan wilayah tersedia dalam angka harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah yang bersangkutan (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang artinya secara kasar dapat menggambarkan makmur atau tidaknya daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan oleh seberapa besar nilai tambah yang tercipta didaerah tersebut dan juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar daerah atau mendapat aliran dana dari luar daerah (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Jenis pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

berdasarkan harga konstan, yaitu menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi), yang menggunakan pengali harga konstan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggambarkan dampak implementasi terhadap kebijakan pemerintahan khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi, secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Indikator ini sangat penting untuk daerah untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan dimasa mendatang. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Parera, 2018).

Para ahli ekonomi klasik membagi empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan sumberdaya alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Ahli ekonomi klasik memfokuskan perhatiannya kepada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi tingkat produksi nasional dan pendapatan suatu wilayah. Dapat dilihat, apabila terdapat kekurangan penduduk dan produksi marginal lebih tinggi daripada pendapat per kapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin bertambah, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori *Schumpeter* menekankan tentang pentingnya peranan para pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan (inovasi) dalam bidang ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan produk-produk baru, mempertinggi efisiensi cara produksi dalam menghasilkan suatu barang. Memperluas pasar ke pasar-pasar yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah baru dan mengadakan perubahan-perubahan positif dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi koefisiensi kegiatan perusahaan (Sukirno,2013).

Teori Neoklasik mengatakan bahwa, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi yang dapat dilihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Samuelson menjelaskan, setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki *competitive advantage* untuk dapat dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai relative singkat dan besaran sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk itu berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh (Tarigan, 2005).

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2010).

2.4.1 Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah

Interpretasi pertumbuhan wilayah dalam arti dinamika struktur industri adalah sangat penting karena kerangka dasar analisis pertumbuhan wilayah dan lokasi industri secara komprehensif dan konsisten diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi ekonomi sub nasional dan pembangunan fisik. Analisis tersebut menggunakan tiga asumsi, yaitu bahwa pertumbuhan wilayah secara *overall* (volume kegiatan ekonomi) ditentukan oleh kondisi bermacam-macam faktor lain dari pada pendapatan regional perkapita (aspek kesejahteraan dari pertumbuhan), bahwa pembangunan masa depan adalah hasil dari kegiatan dan keputusan masa lalu dan sekarang, dan sangat penting dari semua itu adalah bahwa faktor-faktor kritis dalam pola pertumbuhan wilayah yang terus berubah itu adalah hasil keputusan perusahaan-perusahaan mengenai lokasi dan output (jika dilihat kebelakang adalah sebagai input dan dihubungkan kedepan adalah pasar dari industri-industri dalam perekonomian). Kinerja

pertumbuhan suatu wilayah individual dapat dianalisis peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan wilayah mempunyai kaitan erat dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional mendorong pembangunan wilayah dan pembangunan wilayah memperkuat pembangunan nasional.

Peranan suatu wilayah sebagai komponen (bagian) ekonomi nasional di representasikan oleh sektor industri dan struktur industri yang terdapat pada masing-masing wilayah. Ada suatu wilayah yang memiliki keunggulan lokasional (*locational advantage*) yang memungkinkan pengembangan industri. Sebaliknya wilayah-wilayah lain tidak memiliki keunggulan lokasional sehingga pengembangan industri mengalami hambatan. Tanpa memandang industri itu berkembang cepat atau lambat, yang penting diukur adalah proporsi atau kontribusi sektor industri dimasing-masing wilayah terhadap total industri nasional (indikator pertumbuhan lain, misalnya penduduk dan pendapatan). Analisis kontribusi (*share analysis*) ini memberikan gambaran struktur suatu wilayah secara statis. Para peneliti telah berupaya untuk mengkaji struktur wilayah secara dinamis dengan menerapkan *shift analysis* (analisis pergeseran). Analisis ini membandingkan perubahan regional yang terjadi disuatu wilayah antara dua titik waktu tertentu, dan khususnya mengkonsentrasikan pada apakah perubahan regional itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan perubahan rata-rata nasional yaitu apakah terjadi pergeseran atau perubahan yang menaik atau menurun.

Perubahan regional terdiri dari dua komponen, yaitu pergeseran proporsional (*proportionality shift*) dan pergeseran diferensial (*differential shift*). Pergeseran proporsional mengukur pengaruh komposisi industri yang dilihat secara nasional bahwa beberapa sektor mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Jadi, suatu wilayah yang memiliki sektor-sektor yang tingkat pertumbuhannya lambat akan memperlihatkan pergeseran proporsional yang menurun. Sebaliknya suatu wilayah yang mempunyai sektor-sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi akan memperlihatkan pergeseran yang menaik. Pergeseran diferensial terjadi dari keadaan bahwa industri-industri tumbuh di beberapa wilayah lebih cepat dari wilayah-wilayah lain.

Wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik pergeseran yang menaik adalah daerah-daerah yang memiliki keunggulan lokasional yang memungkinkan pengembangan kegiatan-kegiatan tertentu lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain. Penting untuk mengetahui bahwa pengaruh proporsional dan diferensial itu berbeda karena mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda. Untuk memahami pengaruh proporsionalitas, perlu diperhatikan kekuatan yang mempengaruhi komposisi output pada konteks nasional. Diantara kekuatan-kekuatan dominan, yaitu perubahan produktivitas pada sisi *supply* (penawaran) yang memungkinkan sumberdaya-sumberdaya berpindah dari sektor yang memiliki produktivitas rendah ke produktivitas tinggi dan elastisitas pendapatan dari permintaan pada sisi *demand*. Kekuatan-kekuatan lainnya, misalnya

perubahan teknologi, introduksi produk-produk baru, perubahan cita rasa, dan lainnya, mempengaruhi komposisi output nasional secara berlebihan. Selanjutnya perlu menganalisis keunggulan setiap wilayah untuk industri-industri yang dimiliki yang berkembang cepat atau lambat nasional. Pengaruh diferensial dapat dijelaskan bahwa beberapa wilayah memperoleh keunggulan relatif selama suatu jangka waktu karena memiliki aksesibilitas terhadap pasar dan atau terhadap input untuk industri-industri spesifik (Sasmita, 2005).

2.5 Sektor Unggulan

Dalam lingkungan daerah suatu negara, suatu komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal di daerahnya sendiri, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor atau subsektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga diluar daerahnya sendiri. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor basis atau unggulan (Saharuddin, 2006). Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memilih permintaan yang lebih tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Tumengung, 1996). Sektor atau subsektor ekonomi unggulan yang ditetapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

daerah atau lebih dikenal dengan sektor primer yang memiliki kriteria sebagai sektor maju dan cepat tumbuh dalam hal ini sektor atau subsektor yang memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dan memiliki kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan sektor yang sama pada level provinsi (Widodo, 2006).

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu: 1) sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, 2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, 3) sektor unggulan memiliki keterikatan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang, 4) sektor unggulan harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Rachibi, 2001). Dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.
4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.

6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional (Mulyanto, 1999).

Teori pembangunan daerah yang ada sekarang ini belum mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan perekonomian daerah secara tuntas dan komprehensif. Beberapa pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu pendekatan yang selama ini dipakai antara lain analisis *location quation* (LQ) dan *shift share*. Keduanya digunakan untuk mengetahui sektor unggulan atau sektor basis dalam pembangunan ekonomi.

a. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kabupaten/kota dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasiasiasi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai

sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai *industrial mix analysis*, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *shift share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak di gunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan. Pertambahan nilai tambah regional total, dapat diurai menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula di sebut komponen *national share*. Komponen *national share* adalah banyaknya nilai tambah regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode analisis. Hal ini dapat di gunakan sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen “*shift*” adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan

dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, shift netto dapat di bagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* dan *differential shift component*. *Proportional shift component* dikenal sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, mengukur besarnya *shift* regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat atau merosot.

Differential shift component, dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat di daerah yang bersangkutan pada tingkat nasional yang di sebabkan oleh faktor lokasional internal. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah dan efisien akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Analisis *shift share* adalah alat analisis untuk mengetahui pergeseran kontribusi dan sumbangannya terhadap sistem perekonomian yang lebih luas. *Shift share* digunakan untuk melihat adanya perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah dan daerah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau

produksi ruang lingkup regional secara umum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode ini akan dapat mengetahui potensi setiap kabupaten/kota dalam pertumbuhan wilayah (Tarigan, 2005).

Bentuk umum analisis *shift share* dan komponen-komponenya adalah:

- Δ : pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t - n)
- N : *National* atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi jenjangnya
- r : region atau wilayah analisis
- E : employment atau banyaknya lapangan kerja
- i : sektor industri
- t : tahun
- t - n : tahun awal
- t + m : tahun proyeksi
- NS : *National Share*
- P : *Proportional Share*
- D : *Differential Shift*

$$\Delta E_{r,i,t} = (NS_i + P_{r,i} + D_{r,i}) \quad (2.1)$$

Dimana $\Delta E_{r,i,t}$ adalah tambahan semua sektor : NS_i adalah *national share*, $P_{r,i}$ adalah *proportional share*, $D_{r,i}$ adalah *differential shift*. (Tarigan, 2005)

b. Analisis *loqation quotient*

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (*basic sector*) dan sektor mana yang bukan sektor basis (*non basic sector*). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} \quad (2.2)$$

Keterangan :

- LQ : Nilai *Location Quotient*
- Si : PDRB Sektor i di daerah analisis
- S : PDRB total di daerah analisis
- Ni : PDRB Sektor i di daerah referensi
- N : PDRB total di daerah referensi

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang *homogen* pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Ini mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa dikembangkan di setiap daerah. Analisis LQ juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis (Warpani, 2001).

2.6 Pendapatan Daerah

Pendapatan regional atau daerah adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

2.6.1 Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut. Yang pertama, kenaikan atau penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak. Kedua, Kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah di tiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan.

Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk menentukan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

2.6.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan

ekonomi dari tahun ketahun dengan tidak memperhitungkan unsur inflasi (Hajeri, 2015)

PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. PDRB dengan sisi pendekatan produksi atau dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan PDRB dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (Hutabarat, 2020).

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalan; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air Bersih; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan

dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/entrepreneurship); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).
3. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2. Konsumsi pemerintah, 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4. Perubahan stok, dan 5. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena

didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto (Widodo, 2006).

Pendapatan Per Kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian diwilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (Tarigan, 2005).

2.7 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai analisis sektor unggulan bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah

meneliti dan mengkaji permasalahan ini. Untuk memperkuat latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat penelitian terkait yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Penelitian dan Judul	Metode Analisis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode <i>Shift Share</i> Dan <i>Location Quotient</i> ” Basuki & Mujiraharjo (2017)	<i>Shift share & Location Quotient</i>	Menggunakan metode analisis yang sama dan variable penelitian yang sama, yaitu: PDRB	Perbedaan lokasi penelitian, yaitu: Kabupaten Bireuen
2.	“Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan” Yuhan & Cahyono	<i>Location Quotient, Shift Share & Model Rasio Pertumbuhan (MPR)</i>	Sama-sama menggunakan variable PDRB sebagai variable penelitian	Perbedaan lokasi penelitian dan tidak menggunakan metode Model Rasio Pertumbuhan (MPR)
3.	“Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Taboali Dengan Metode <i>Shift Share</i> Dan <i>Location Quotient</i> ” Kartanegara & Putri (2020)	<i>Location Quotient & Shift Share</i>	Menggunakan variable yang sama dan metode penelitian yang sama	Lokasi penelitian yang berbeda

No.	Penelitian dan Judul	Metode Analisis	Persamaan	Perbedaan
4.	“Penentuan Setor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas” Hutabarat (2020)	<i>Location Quotient, Shift Share & Typologi Klassen</i>	Menggunakan variable yang sama, yaitu PDRB	Lokasi penelitian yang berbeda dan tidak menggunakan metode <i>Typologi Klassen</i>
5.	“Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya” Hajeri (2015)	<i>Typology Klassen, Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share & Overlay</i>	Menggunakan variable yang sama, yaitu PDRB	Lokasi penelitian yang berbeda dan tidak menggunakan metode <i>Typology Klassen, Dynamic Location Quotient Serta Overlay</i>
6.	“Analisis Shift Share Terhadap Perekonomian Kota Sorong” Salakory & Matulesy (2019)	<i>Shift share</i>	Menggunakan variabel yang sama	Lokasi penelitian yang berbeda serta tehnik yang digunakan di penelitian ini hanya satu (<i>shift share</i>)
7.	“Applying Location Quotient And Shift-Share Analysis in Determining Leading Sectors in Teluk Binuni Regency” Maspatella Dkk (2021)	<i>Location Quotient & Shift Share</i>	Menggunakan variabel yang sama serta metode penelitian yang sama (<i>Location Quotient & Shift Share</i>)	Lokasi penelitian yang berbeda

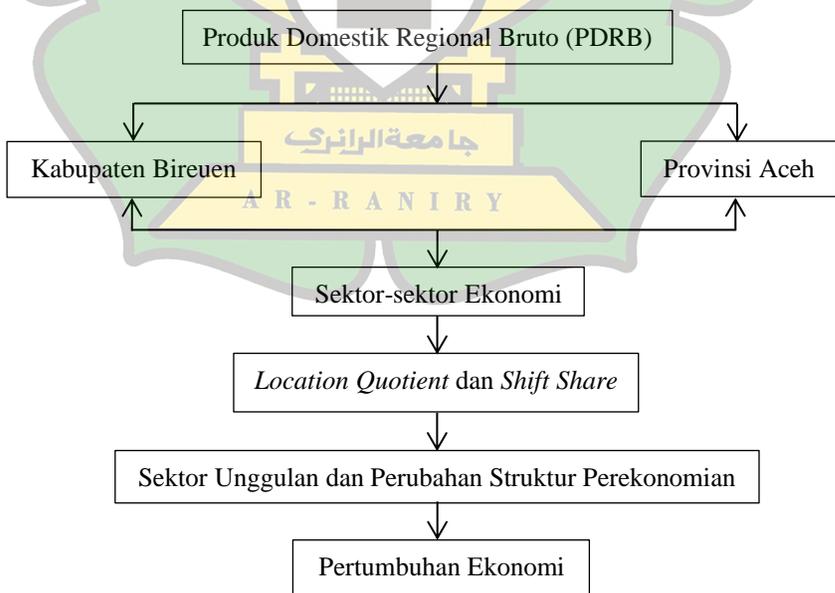
Sumber: (data diolah)

2.8 Kerangka Berpikir

PDRB suatu wilayah dapat menganalisis mengenai struktur perekonomian wilayah tersebut, peran disetiap sektor serta bagaimana pergeserannya. Terdapat dua analisis yang digunakan untuk menentukan sektor mana yang memajukan perekonomian di kabupaten Bireuen, yaitu *location quotien* dan *shift share*. Dari dua alat analisis tersebut, dapat diketahui sektor mana saja yang termasuk ke dalam sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bireuen sehingga dapat lebih memfokuskan pada sektor tersebut dan pembangunan yang ada akan semakin maju dan mengalami peningkatan. Kerangka penelitian ini dijadikan dasar dalam penelitian yang dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis yaitu analisis *shift share* dan analisis *location quotient*. Analisis ini bertujuan untuk melihat sektor unggulan serta untuk melihat perubahan struktur perekonomian daerah. Peneliti mengambil data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor basis dan menjadi penggerak perekonomian menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh.

3.2 Sample Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021, dengan menggunakan sample 1 kabupaten (Bireuen) dan 1 provinsi (Aceh).

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini berbentuk runtut waktu (*time series*) atau disebut data tahunan, yaitu data PDRB Provinsi Aceh dan PDRB Kabupaten Bireuen berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha (sektoral) dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variable

Definisi operasional adalah suatu informasi mengenai cara mengukur variable yang diteliti serta memberikan informasi untuk peneliti lain dengan variable yang sama.

3.4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto adalah penambahan nilai bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di wilayah domestik di suatu negara, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki tersebut residen atau tidak residen, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha. (BPS, 2021)

3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses sebuah kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat

pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi. (sukirno, 2011).

3.4.3 Sektor-Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan ekonomi kedalam beberapa kelompok tertentu. Kegiatan ekonomi yang beragam menyebabkan struktur perekonomian yang beragam pula tergantung bagaimana peran atau kontribusi dari setiap sektor ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bireuen, terdapat 17 sektor-sektor ekonomi yang diteliti, diantaranya:

1. Pertanian kehutanan dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi makan dan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa dan keuangan asuransi
12. *Real estate*
13. Jasa perusahaan

14. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan social
17. Jasa lainnya.

3.4.4 Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang unggul baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi terhadap PDRB. Sektor unggulan adalah sektor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Sektor unggulan mampu memenuhi permintaan dari dalam daerahnya serta mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerah. Sektor unggulan juga merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan skala produksi. Dengan mengetahui sektor-sektor mana saja yang unggul, maka dapat memiliki peluang untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Biereun.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis

terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan analisa deskriptif, yang mana untuk menggambarkan berbagai karakteristik data, mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih, sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu, atau merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Sujarweni, 2015). Penelitian ini menggunakan tehnik analisis *location quotient* (LQ) yaitu untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bireuen. Untuk melihat perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Bireuen dianalisis menggunakan teknik *shift share* (SS)

3.5.1 Analisis *Loqation Quotient* (LQ)

Tehnik analisis *location quotient* adalah suatu pendekatan tidak langsung untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu wilayah guna melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke dalam sektor unggulan (Arsyad, 2010: 390). Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Bireuen digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Bireuen yang memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian serta

mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Perhitungan *location quotient* (LQ) menggunakan rumus: (Tarigan, 2004: 78)

$$location\ quotient\ (LQ) = \frac{S_i/S}{N_i/N} \quad (3.1)$$

Keterangan :

Lq	=	Nilai <i>Location Quotient</i>
S _i	=	PDRB setor <i>i</i> di Kabupaten Bireuen
S	=	PDRB total Kabupaten Bireuen
N _i	=	PDRB sektor <i>i</i> di Provinsi Aceh
N	=	PDRB total di Provinsi Aceh

Berdasarkan rumus diatas maka ada 3 (tiga) kemungkinan nilai LQ yang ditemukan, yaitu:

1. Nilai LQ di sektor $i = 1$
maka hal ini berarti laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Bireuen adalah sama dengan laju pertumbuhan di sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh.
2. Nilai LQ di sektor $i > 1$
Berarti laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Bireuen lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan perekonomian Provinsi Aceh. Maka, sektor *i* merupakan sektor unggulan juga merupakan sektor basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Bireuen.
3. Nilai LQ di sektor $i < 1$

Hal ini berarti laju pertumbuhan sektor *i* di Kabupaten Bireuen lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh. Maka, sektor *i* bukan merupakan sektor basis serta tidak dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Bireuen.

3.5.2 Analisis *Shift Share*

Tarigan (2005) menyatakan bahwa analisis *shift share* dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan pertumbuhan sektoral antar wilayah administrasi yang lebih rendah dan wilayah administrasi yang lebih tinggi atau sering disebut tingkat nasional. Analisis *shift share* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah di Kabupaten Bireuen. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor- sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen dibandingkan Provinsi Aceh. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Apabila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain, yaitu:

- a. *National Share* untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. Hasil perhitungan akan

menggambarkan peranan pertumbuhan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah.

- b. *Proportional shift* untuk melihat pengaruh sektor i secara nasional akan pertumbuhan perekonomian sektor i pada daerah yang dianalisis. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
- c. *Differential Shift* menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Perhitungan analisis Shift Share dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta E_{r,i,t} = (NS_i + P_{r,i} + D_{r,i}) \quad (3.2)$$

Perhitungan *National Share* adalah sebagai berikut:

$$NS_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \quad (3.3)$$

Perhitungan *Proportional Share* adalah sebagai berikut:

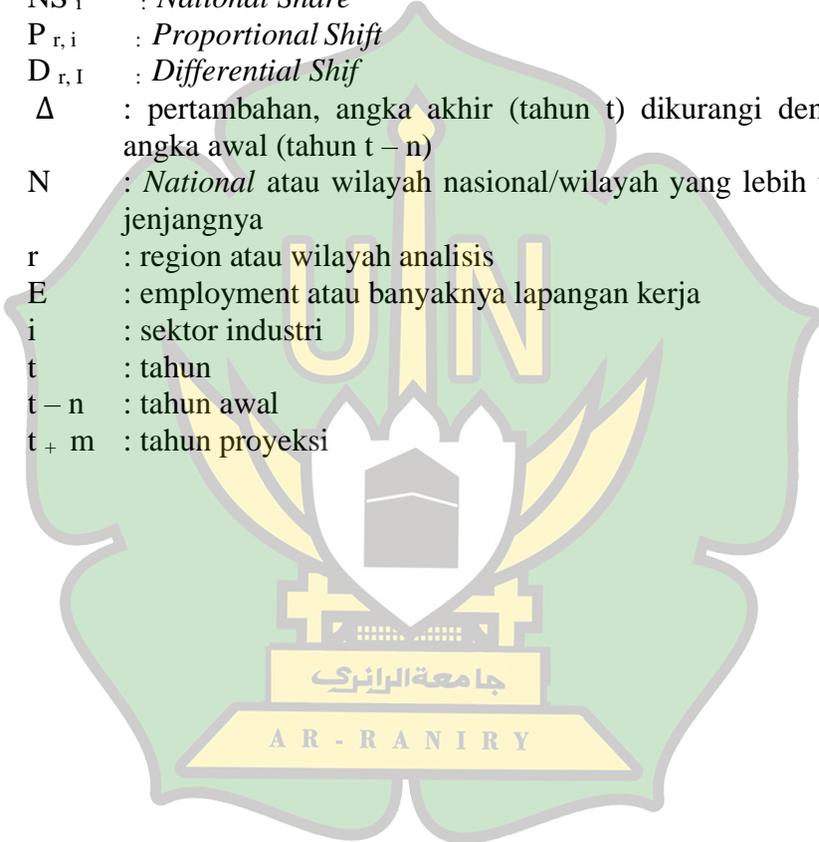
$$P_{r,i,t} = \{ (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n}) \} \times E_{r,i,t-n} \quad (3.4)$$

Perhitungan *Differential Shift* adalah sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \{ E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n} \} \quad (3.5)$$

Dimana $\Delta E_{r,i,t}$ adalah tambahan semua sektor : NS_i adalah *National Share*, $P_{r,i}$ adalah *Proportional Share*, $D_{r,i}$ adalah *Differential Shift*. (Tarigan, 2005)

- $\Delta E_{r,i,t}$: Tambahan semua sektor
- NS_i : *National Share*
- $P_{r,i}$: *Proportional Shift*
- $D_{r,i}$: *Differential Shift*
- Δ : pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t – n)
- N : *National* atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi jenjangnya
- r : region atau wilayah analisis
- E : employment atau banyaknya lapangan kerja
- i : sektor industri
- t : tahun
- t – n : tahun awal
- t + m : tahun proyeksi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

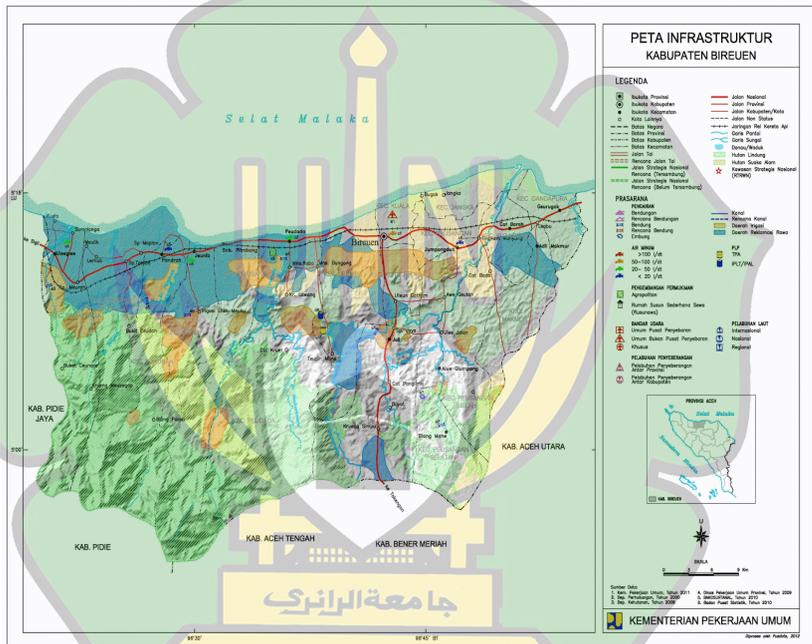
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Bireuen menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, yang pada awalnya pembentukan diatur dalam keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Aceh Utara sebagai salah satu daerah tingkat dua, Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1999 melalui Undang-Undang no 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Semasa Bupati Drs. H. Ramdhani Raden (1999-2002) bersama dengan DPRD Kabupaten Bireuen, menetapkan pertauran daerah tentang hari jadi yakni pada 4 Oktober 1999 (Bireuenkab.go.id)

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas Pulau Sumatera merupakan nilai strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini posisi Kabupaten Bireuen juga mendukung kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa lainnya. Posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54'-50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20'- 970 21' Bujur Timur

(BT). Dengan luas wilayah 1.796,31 kilometer persegi (km²) atau 179.631 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Aceh (57.365,57 km²) adalah sekitar 3,13 persen.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Bireuen



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bireuen (2021).

Wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 Kecamatan, meliputi: kecamatan samalanga, kecamatan simpang mamplam, kecamatan pandrah, kecamatan jeunib, kecamatan peulimbang, kecamatan peudada, kecamatan juli, kecamatan jeumpa, kecamatan kota juang, kecamatan kuala, kecamatan jangka, kecamatan peusangan,

kecamatan peusangan selatan, kecamatang peusanga siblah krueng, kecamatan makmur, kecamatan gandapura dan kecamatan kuta blang. Kecamatan peudada dan kecamatan juli merupakan kecamatan yang luas wilayahnya paling dominan diantara kecamatan lain. Dalam hal ini kecamatan peudada dengan luas wilayah 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Bireuen, kecamatan juli dengan luas wilayah sekitar 23.118,35 Ha atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen. Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan kota juang (1.690,87Ha) dan Kecamatan Kuala (1. 724,56 Ha) dengan proporsi masing-masing 0,94 dan 0,96 persen dari luas wlayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Adapun batasan fisik wilayah administratif kabupaten Bireuen, yaitu: sebelah utara dengan selat malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Utara, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah dan sebelah barat daya dengan Kabupaten Pidie dan sebelah barat dengan Kabupaten Pidie Jaya.

Geomorfologi daerah di Kabupaten Bireuen terbagi atas tiga bagian yaitu: (1). Daerah pesisir utara dengan struktur tanah berupa pasir, banyak ditumbuhi pohon kelapa, terdapat tambak-tambak rakyat, pemukiman penduduk desa pantai, tempat pembenihan, kawasan tambak, daerah muar (dipakai untuk tempat TPI dan PPI) dan beberapa kota-kota kecamatan yang berada di kawasan ini. (2). Daerah tengah didominasi dengan persawahan, perkebunan penduduk, pemukiman penduduk dan ibukota kabupaten. (3).

Daerah selatan adalah daerah daratan tinggi yang berbukit yang pada umumnya merupakan kawasan hutan, meliputi hutan lindung dan hutan budidaya (DPMPTSP.Bireuenkab.go.id)

4.2 Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *location quotient* dan *shift share*. dengan tujuan untuk menentukan sektor mana yang menjadi sektor unggulan serta sektor mana yang memiliki daya saing, selain itu juga sebagai pembanding pertumbuhan antara satu sektor dan sektor lainnya di Kabupaten Bireuen.

1.2.1 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ)

Pendekatan *location quotient* (LQ) adalah salah satu pendekatan yang sering dilakukan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk mengetahui sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Analisis LQ membandingkan besarnya peranan sebuah sektor pada tingkat Kabupaten Bireuen dengan besar peranan sektor yang sama pada tingkat pembanding yaitu Provinsi Aceh. Besarnya nilai LQ merupakan sebuah indikator dasar untuk menentukan sektor potensial dalam suatu daerah dan peluang untuk mengembangkan sektor tersebut dimasa yang akan datang, karena yang menjadi sektor potensial tersebut akan mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu sendiri dan juga kebutuhan untuk daerah lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki nilai koefisien LQ > 1 menunjukkan bahwa

sektor tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Bireuen, artinya selalin dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bireuen sendiri juga memiliki potensi ekspor ke wilayah lain karena ada surplus pada sektor yang bersangkutan. Adapun sektor yang memiliki $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang besar kepada Kabupaten Bireuen.

Jika sektor menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di Kabupaten Bireuen, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan atau output bagi daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan dari luar daerah akan menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Selanjutnya hal itu akan menaikkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen, perhatian lebih diarahkan pada sektor yang memiliki keunggulan dan yang paling dominan perannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan nilai tambah ekonomi dalam PDRB Kabupaten Bireuen dan PDRB Provinsi Aceh selama periode 2017-2021 diperoleh hasil perhitungan LQ seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Location Quotien Tahun 2017-2021

No	Sektor ekonomi	2017	2018	LQ 2019	2020	2021	Rata-rata	Keterangan
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,10	1,09	1,09	1,09	1,12	1,10	Basis
2	Pertambangan dan penggalian	0,36	0,31	0,30	0,28	0,31	0,31	Non Basis
3	Industri pengolahan	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	Non Basis
4	Pengadaan listrik dan gas	0,57	0,58	0,59	0,62	0,66	0,60	Non Basis
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,37	1,38	1,33	1,37	1,41	1,37	Basis
6	Konstruksi	0,91	0,94	0,95	0,91	0,95	0,93	Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran	1,62	1,67	1,69	1,69	1,74	1,68	Basis
8	Transportasi dan pergudangan	1,27	1,25	1,25	1,37	1,48	1,33	Basis
9	Peyediaan akomodasi dan makan minum	0,83	0,82	0,82	0,85	0,93	0,85	Non Basis
10	Informasi dan komunikasi	0,79	0,78	0,77	0,76	0,79	0,78	Non Basis
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,62	0,62	0,60	0,61	0,65	0,62	Non Basis
12	Real estate	0,76	0,76	0,75	0,75	0,77	0,76	Non Basis
13	Jasa perusahaan	0,45	0,45	0,44	0,47	0,49	0,46	Non Basis
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,86	0,87	0,88	0,90	0,92	0,88	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,69	0,68	0,66	0,66	0,68	0,67	Non Basis
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,76	0,77	0,77	0,77	0,80	0,77	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,91	0,90	0,90	0,89	0,92	0,90	Non Basis

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (Data diolah).

a. Sektor Basis ($LQ > 1$)

Berdasarkan hasil perhitungan *loqation quotient* Kabupaten Bireun, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2021 terdapat 4 sektor yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis, dimana sektor tersebut mampu mengekspor ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bireun memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu 28.547 ha, Kabupaten Bireun juga memiliki hutan seluas 30.679 ha, hutan produksi 32,390 ha, areal pegunungan lain yaitu 110.929 ha menempati posisi terluas kedua di Kabupaten Bireun setelah Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan luas dari hutan rakyat 40 ha. Kabupaten Bireun memiliki 7.614 nelayan dengan hasil perolehan ikan yang ditangkap sebesar 13.160.16 ton. serta banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, kehutana dan perikanan sehingga membuat sektor ini menjadi sektor basis dengan nilai LQ 1,09. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung melambat selama 5 (lima) tahun terakhir, dikarenakan di sebagian wilayah (kecamatan jangka, peusangan, kota juang, kuala, jeumpa, kutablang dan gandapura) terjadi penurunan aktivitas di sawah disebabkan perbaikan irigasi sehingga terjadi kekeringan lahan sawah, biasanya dalam setahun dapat dilakukan 3 kali tanam dan 2 kali panen, pada tahun 2021 hanya dapat dilakukan 2 kali tanam dan 1 kali panen.

Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan serta harapan dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten Bireun. Sektor ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai

penggerak perekonomian Kabupaten Bireuen. Pemerintah setempat harus memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai macam masalah Petani dan nelayan serta menyediakan input untuk mengembangkan sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan di masa yang akan datang. Sektor ini harus dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar dapat memberi output yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upaya ekstensifikasi yang berkeadilan dan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan rehabilitasi kebun dan lahan kritis untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan. Intensifikasi juga perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan produktivitas lahan serta harus ada upaya revitalisasi pertanian guna mendorong perbaikan jumlah dan mutu produksi.

Pembangunan sektor kehutanan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, efisiensi dan nilai tambah serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pengembangan kawasan usaha tani secara komprehensif dan terpadu dengan mengembangkan komoditas unggulan lokal. Untuk mengembangkan subkategori perikanan, maka perlu adanya daya dorong keterpaduan konektivitas yang mampu mempercepat lajunya pertumbuhan. Pengembangan industrialisasi melalui subkategori kelautan dan perikanan harus difokuskan pada penanganan hasil tangkapan maupun budidaya dengan beberapa kebutuhan,

diantaranya adalah: ruang penyimpanan ikan (*cool room*), sarana pengolahan hasil tangkapan/ budidaya (sistem penjemuran rumah kaca) serta pabrik pembuat tepung ikan serta pabrik pakan ikan. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengelolaan potensi sumber daya alam sehingga dapat saling menguntungkan semua pihak. Langkah-langkah seperti ini harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan tercantum secara jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Sektor ini termasuk kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui saluran pipa untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga pengumpulan, penjernihan serta pengolahan air sungai dan danau, mata air, hujan dan lain-lain. termasuk ke dalam sektor basis dengan koefisien 1,36 yang berarti sektor ini bisa ditingkatkan dan dapat dipertahankan dengan baik oleh pemerintah di kabupaten Bireuen. Pelanggan air minum PDAM di Kabupaten Bireuen sangat banyak. Jumlah pelanggan air minum PDAM di Kabupaten Bireuen sebanyak 25.909 pelanggan. Pelanggan terbesar berasal dari pengguna rumah tangga dengan persentase 88 persen pelanggan aktif. Pelanggan air terbanyak berasal dari Kecamatan Jeunib yaitu sejumlah 3.334 pelanggan dengan volume air yang disalurkan sejumlah 595.106 m kubik yang bernilai 1.875.824 rupiah.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran meliputi reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi sektor basis dengan nilai tertinggi

yaitu 1,67. sektor ini sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dikarenakan di Kabupaten Saat ini terdapat 417 perusahaan dengan badan hukum PT, CV/Firma dan perseorangan yang sudah terdaftar di dinas penanaman modal, perdagangan, koperasi dan ukm kabupaten bireuen. Jumlah pasar tradisional sebanyak 56 pasar. Toko di Kabupaten Bireuen berjumlah 1.763, dan kios berjumlah 2.988. kemudian warung berjumlah 600 unit. Unit usaha industri kecil formal yang ada di Kabupaten Bireuen berjumlah 451 unit, dan 3.125 unit usaha non formal. Jenis industri makanan, minuman, dan tembakau dapat menyerap tenaga kerja sebesar 44,78 persen. sektor ini cenderung meningkat selama periode tahun 2017-2019 dan mengalami kontraksi selama tahun 2020 dikarenakan wabah covid, lalu pada tahun 2021 PDRB kembali meningkat.

Dengan banyaknya dan berbagai jenis transportasi di Kabupaten Bireuen Sektor Transportasi dan pergudangan mampu memberikan kontribusi besar kepada perekonomian di Kabupaten Bireuen dengan nilai LQ 1,31 serta dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Jumlah kendaraan antar desa di Kabupaten Bireuen berjumlah 33 unit. Sedangkan jumlah kendaraan penumpang antar kota sebanyak 134 unit. Kendaraan yang paling banyak di Kabupten Bireuen adalah kendaraan beroda dua, yaitu berjumlah 98.565 unit. Kemudian kendaraan terbanyak selanjutnya adalah minibus dan pick up masing-masing 6.901 dan 4.737 unit. Sektor ini mampu memberikan kontribusi besar, namun pada tahun 2020 mengalami

kontraksi dikarenakan pembatasan sosial karena pandemic covid-19 dan juga adanya larangan mudik saat lebaran dan hari libur lainnya, pada tahun 2021 sektor ini kembali membaik.

b. Sektor Non Basis ($LQ < 1$)

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat tiga belas (13) sektor non basis di Kabupaten Bireuen yaitu, sektor Pertambangan dan penggalian; sektor Industri pengolahan; sektor Pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor Peyediaan akomodasi dan makan minum; sektor Informasi dan komunikasi; sektor Jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor Administrasi pemerintah, pertahan dan jaminan sosial wajib; sektor Jasa pendidikan; sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut di Kabupaten Bireuen belum mampu memenuhi sendiri kebutuhannya dan dimungkinkan untuk mengimpor dari luar daerah.

Sektor Pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan nilai LQ terkecil, hal ini terjadi karena di sektor pertambangan dan penggalian dirinci menjadi 4 (empat) subkategori yaitu: subkategori pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, subkategori pertambangan batubara dan lignit, subkategori pertambangan bijih logam, dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya, di Kabupaten Bireuen hanya ada subkategori yang terakhir.

Rendahnya nilai LQ untuk 13 sektor di Kabupaten Bireuen memberi pesan bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan yang tepat dan harus memperhatikan kembali 13 sektor yang belum menjadi sektor basis melalui ekselerasi berbagai program dan kegiatan yang tepat serta penganggaran pembangunan yang memadai supaya dapat dikembangkan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

4.2.2 Hasil Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah teknik untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 5 tahun. Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah (Kabupaten Bireuen) terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas (Provinsi Aceh). Dalam penelitian ini analisis *shift share* dilakukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang terdiri atas 3 komponen analisa, yaitu:

- 1) *National Share* untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. Hasil perhitungan menggambarkan seberapa besar peran wilayah nasional mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah regional yang diamati (kab/kota).

Tabel 4.2
Perhitungan National Share

NO	Sektor Ekonomi	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	<i>national share</i> (c) - (a)
1	pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.840.759,02	1,1155	3.168.866,69	328.107,67
2	pertambangan dan penggalian	231.635,34	1,1155	258.389,22	26.753,88
3	industri pengolahan	144.587,16	1,1155	161.286,98	16.699,82
4	pengadaan listrik dan gas	7.934,99	1,1155	8.851,48	916,49
5	pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.020,80	1,1155	4.485,20	464,40
6	konstruksi	799.994,52	1,1155	892.393,89	92.399,37
7	perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.331.093,59	1,1155	2.600.334,90	269.241,31
8	transportasi dan pergudangan	899.623,77	1,1155	1.003.530,32	103.906,55
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	97.279,57	1,1155	108.515,36	11.235,79
10	informasi dan komunikasi	256.575,19	1,1155	286.209,62	29.634,43
11	jasa keuangan dan asuransi	97.240,59	1,1155	108.471,88	11.231,29
12	<i>real estate</i>	280.357,33	1,1155	312.738,60	32.381,27
13	jasa perusahaan	26.293,00	1,1155	29.329,84	3.036,84
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	705.356,08	1,1155	786.824,71	81.468,63
15	jasa pendidikan	156.672,59	1,1155	174.768,27	18.095,68
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	203.293,04	1,1155	226.773,39	23.480,35
17	jasa lainnya	115.213,95	1,1155	128.521,16	13.307,21
18	PDRB	9.197.930,54	18,9635	174.424.955,80	165.227.025,26

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (Data diolah).

Nilai di tabel *National Share* menunjukkan nilai positif untuk semua sub sektor ekonomi, yang menandakan ketika pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Aceh positif, akan memberikan dampak pertumbuhan yang positif juga bagi sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bireuen, hal ini tidak terlepas dari dampak kebijakan ekonomi Provinsi Aceh yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Sektor ekonomi yang mendapat dampak terbesar dari pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 328.107,66 karena mayoritas penghasilan masyarakat di Kabupaten Bireuen masih bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan, dan sektor yang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya 464,40 dengan demikian, untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Bireuen, pemerintah daerah setempat harus mampu memantik sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang untuk dapat berkembang lebih besar dari sekarang Tidak hanya itu, perlu adanya juga peningkatan dari sektor-sektor lain seperti sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa perusahaan.

- 2) *proportional shift* untuk mengukur apakah aktivitas ekonomi pada sektor tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara provinsi atau nasional.

Tabel 4.3
Perhitungan *Proportional Share*

	Sektor Ekonomi	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) - (c)	<i>proportional share</i> (a) x (d)
1	pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.840.759,02	1,1091	1,1155	-0,0064	-18.175,84
2	pertambangan dan penggalian	231.635,34	1,2103	1,1155	0,0948	21.952,43
3	industri pengolahan	144.587,16	1,0491	1,1155	-0,0664	-9.602,87
4	pengadaan listrik dan gas	7.934,99	1,1790	1,1155	0,0635	503,48
5	pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.020,80	1,3259	1,1155	0,2104	845,84
6	konstruksi	799.994,52	1,1897	1,1155	0,0742	59.327,03
7	perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.331.093,59	1,0574	1,1155	-0,0581	-135.391,94
8	transportasi dan pergudangan	899.623,77	0,9040	1,1155	-0,2115	-190.237,02
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	97.279,57	1,0023	1,1155	-0,1132	-11.012,07
10	informasi dan komunikasi	256.575,19	1,2961	1,1155	0,1806	46.341,11
11	jasa keuangan dan asuransi	97.240,59	1,0839	1,1155	-0,0316	-3.071,72
12	real estate	280.357,33	1,1658	1,1155	0,0503	14.093,87
13	jasa perusahaan	26.293,00	1,0950	1,1155	-0,0205	-538,22
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	705.356,08	1,1279	1,1155	0,0124	8.747,51
15	jasa pendidikan	156.672,59	1,2284	1,1155	0,1129	17.692,76
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	203.293,04	1,3038	1,1155	0,1883	38.287,93
17	jasa lainnya	115.213,95	1,1717	1,1155	0,0562	6.474,21
18	PDRB	9.197.930,54	1,1155	18,9635	-17,848	-164.164.263,55

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (Data diolah).

Berdasarkan analisis *Proportional Share* diketahui bahwa ada 7 sektor ekonomi di Kabupaten Bireuen yang bertanda negatif, karena berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot yaitu sektor (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Industri Pengolahan (3) Perdagangan Besar dan Eceran (4) Transportasi dan Pergudangan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6) Jasa Keuangan dan Asuransi (7) Jasa Perusahaan Hasil yang negatif ini terjadi karena ditingkat Provinsi Aceh pertumbuhan sektor-sektor tersebut mengalami perlambatan sehingga memberikan dampak pertumbuhan yang lamban terhadap sektor-sektor yang sama di Kabupaten Bireuen.

Secara sektoral, sektor yang memiliki nilai *proportional share* positif yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebut berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh lebih cepat dan sektor tersebut lebih berkembang di Provinsi Aceh.

Sektor Konstruksi dan sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang paling besar pertumbuhannya, digerakkan oleh dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bireuen

yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan di wilayah Kabupaten Bireuen itu sendiri. Nilai *Proportional share* totalnya -164.164.263,55 hal ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Bireuen lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat Provinsi Aceh, serta mengalami penurunan dan tidak memiliki sinkronisasi yang erat dengan kegiatan sektoral di Provinsi Aceh, seperti dalam hal permintaan produk, ketersediaan bahan mentah, struktur pasar serta permintaan penawaran barang dan jasa masih kurang adanya korelasi dalam kebijakan pemerintah dengan struktur industri dan keragaman pasar.

- 3) *Differential Shift* merupakan indikator yang memberikan penjelasan dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah (Bireuen) dengan sektor perekonomian di provinsi (Aceh). *Differential shift* dapat menjelaskan seberapa besar perubahani dalam sektor ekonomi tertentu yang disebabkan oleh beberapa keunggulan kompetitif atau daya saing unik yang dimiliki oleh daerah yang diteliti dalam hal ini Kabupaten Bireuen.

Tabel 4.4
Perhitungan Differential Shift

NO	Sektor Ekonomi	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) x (c)	differential shift (a) - (d)
1	Pertanian	3.140.368,14	1,1091	2.840.759,02	3.150.690,85	-10.322,71
2	Pertambangan	243.006,42	1,2103	231.635,34	280.341,65	-37.335,23
3	industri	150.235,16	1,0491	144.587,16	151.684,10	-1.448,94
4	pengadaan listrik	10.662,99	1,1790	7.934,99	9.354,96	1.308,03
5	pengadaan air	5.387,08	1,3259	4.020,80	5.331,04	56,04
6	konstruksi	974.255,32	1,1897	799.994,52	951.720,92	22.534,40
7	perdagangan	2.603.708,90	1,0574	2.331.093,59	2.464.942,96	138.765,94
8	Transportasi	927.497,40	0,9040	899.623,77	813.293,29	114.204,11
9	penyediaan akomodasi	107.251,69	1,0023	97.279,57	97.503,29	9.748,40
10	informasi komunikasi	327.945,83	1,2961	256.575,19	332.550,73	-4.604,90
11	jasa keuangan	108.318,01	1,0839	97.240,59	105.400,15	2.917,86
12	real estate	323.468,06	1,1658	280.357,33	326.832,48	-3.364,42
13	jasa perusahaan	30.593,90	1,0950	26.293,00	28.791,62	1.802,28
14	administrasi	831.152,71	1,1279	705.356,08	795.572,22	35.580,49
15	jasa pendidikan	185.848,52	1,2284	156.672,59	192.461,03	-6.612,51
16	jasa kesehatan	271.118,22	1,3038	203.293,04	265.061,32	6.056,90
17	jasa lainnya	133.661,58	1,1717	115.213,95	134.995,37	-1.333,79
18	PDRB	10.374.479,90	1,1155	9.197.930,54	10.260.692,24	113.787,66

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (data diolah)

Differential Shift menunjukkan kemampuan atau daya saing suatu sektor di regional (Bireuen) terhadap sektor yang sama pada skala provinsi (Aceh) Seperti yang terdapat dalam penelitian Erviana yang mengatakan jika *differential shift* positif maka unsur

tersebut merupakan jantungnya kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor ke daerah yang bersangkutan. Nilai *differential shift* total adalah 113.787,66 terdapat 10 sektor yang tumbuh positif atau yang memiliki daya saing yang kuat, diantaranya adalah sektor: Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sektor yang mengalami daya saing yang negatif diantaranya adalah: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industri pengolahan, sektor Informasi dan Komunikasi serta sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Sektor perekonomian yang nilainya negatif memiliki asumsi bahwa komoditas yang dikeluarkan oleh sektor tersebut kalah bersaing dengan produk-produk dari luar wilayah tersebut.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mempunyai nilai *differential shift* tertinggi yaitu 138.810,57 artinya sektor tersebut memiliki daya saing yang sangat baik, yang dipengaruhi oleh bertambah banyaknya perusahaan,

koperasi, UMKM, pasar tradisional, toko, warung serta seluruh kedai yang ada di Kabupaten Bireuen semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai nilai negatif sebesar -37.318,66 artinya sektor tersebut kurang baik karena tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar yang masuk ke Kabupaten Bireuen, penyebab lainnya juga adalah di Kabupaten Bireuen hanya ada subkategori pertambangan dan penggalian lainnya.

Nilai komponen *differential shift* memiliki tanda yang positif, ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif perekonomian Kabupaten Bireuen memiliki hasil yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bireuen. Untuk menjadikan semua sektor yang ada di Kabupaten Bireuen berdaya saing tinggi, maka segenap masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta harus sama-sama membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang belum berdaya saing tinggi tersebut.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan *Shift Share*

NO	Lapangan Usaha	National share	Proportional share	Differential shift	Total
1	Pertanian	328.107,67	-18.175,84	-10.322,71	299.609,12
2	Pertambangan	26.753,88	21.952,43	-37.335,23	11.371,08
3	Industri pengolahan	16.699,82	-9.602,87	-1.448,94	5.648,00
4	Pengadaan listrik	916,49	503,48	1.308,03	2.728,00
5	Pengadaan air	464,40	845,84	56,04	1.366,28
6	Konstruksi	92.399,37	59.327,03	22.534,40	174.260,80
7	Perdagangan	269.241,31	- 135.391,94	138.765,94	272.615,31
8	Transportasi	103.906,55	- 190.237,02	114.204,11	27.873,63
9	Penyediaan akomodasi	11.235,79	-11.012,07	9.748,40	9.972,12
10	Informasi komunikasi	29.634,43	46.341,11	-4.604,90	71.370,64
11	Jasa keuangan	11.231,29	-3.071,72	2.917,86	11.077,42
12	Real estate	32.381,27	14.093,87	-3.364,42	43.110,73
13	Jasa perusahaan	3.036,84	-538,22	1.802,28	4.300,90
14	Administrasi	81.468,63	8.747,51	35.580,49	125.796,63
15	Jasa pendidikan	18.095,68	17.692,76	-6.612,51	29.175,93
16	Jasa kesehatan sosial	23.480,34	38.287,93	6.056,90	67.825,18
17	Jasa lainnya	13.307,21	6.474,21	-1.333,97	18.447,63
18	PDRB	165.227.025,25	- 164.164.263,55	113.787.366	1.176.549,36

Sumber: BPS Bireuen, tahun 2017-2021 (data diolah)

Kesimpulan yang didapat dari seluruh penjumlahan komponen *shift share* ialah semua sektor memiliki nilai yang positif, dengan total nilai *shift share* sebesar 1.176.549,36. Hal tersebut berarti sektor-sektor yang ada di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut berpeluang meningkatkan nilai tambah perekonomian di Kabupaten Bireuen. peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bireuen sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar kepada pertumbuhan Kabupaten Bireuen adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 299.609,12 disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi sebanyak 272.615,31 selanjutnya ada sektor konstruksi dengan total nilai 174.260,80 dan sektor Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib menyumbang sebesar 125.796,63. Sedangkan sektor dengan nilai terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu senilai 1.366,28.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor basis (Unggulan) dan non basis (non unggulan) di Kabupaten Bireuen adalah:
 - a) Sektor basis meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan dau ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; serta sektor transportasi dan pergudangan.
 - b) Sektor non basis meliputi sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor kontruksi; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.
2. Berdasarkan hasil analisis *shift share* secara agregat terjadi pertambahan tingkat *output* (*national share*) ekonomi selama tahun 2017-2021 sebesar Rp 165.227.025,25 juta disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, pengaruh dari bauran industri/sektoral (*Proportional Share*) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bernilai negatif. Secara

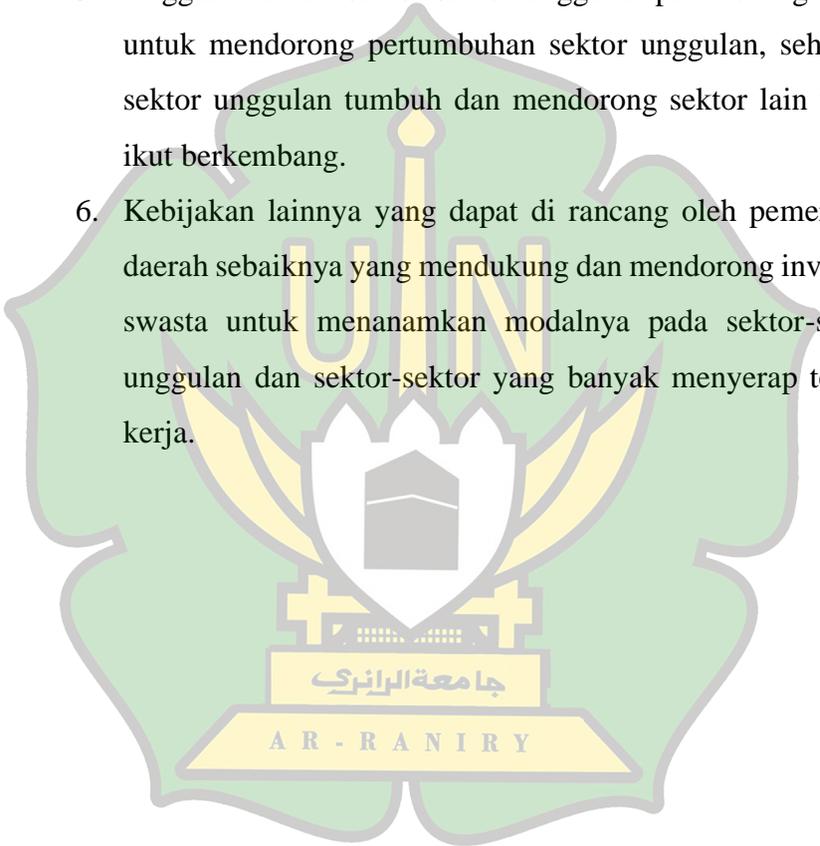
keseluruhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Bireuen masih banyak memiliki daya saing atau kemandirian daerah seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan :

1. Sektor ekonomi di Kabupaten Bireuen harus dikembangkan melalui strategi pembangunan ekonomi yang tepat, sehingga potensi ekonomi di Kabupaten Bireuen dapat tumbuh dan memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen.
2. Dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menjadikan sektor-sektor unggulan sebagai prioritas agar dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam memacu perekonomian Kabupaten Bireuen, pemerintah daerah sebaiknya fokus pada sektor-sektor unggulan terutama sektor-sektor dengan penyumbang *multiplier* terbesar dan banyak menyerap tenaga kerja.

4. Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas sektor unggulan atau basis dengan tetap memperhatikan sektor non basis secara proporsional.
5. Anggaran untuk sektor-sektor unggulan perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan, sehingga sektor unggulan tumbuh dan mendorong sektor lain untuk ikut berkembang.
6. Kebijakan lainnya yang dapat di rancang oleh pemerintah daerah sebaiknya yang mendukung dan mendorong investasi swasta untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Arsyad, Lincolin. (2002). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP .
- Azwar, Saifuddin. (1997). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basuki, M., & Mujiraharjo. F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 15 (1), 52-60.
- Beiq., Syauqi. I., & Arsyianti. L. D. (2016) *Ekonomi Pembangunan Syariah* Jakarta: Rajawali Press.
- BPS. (2017-2021). *PBDR Se-Kabupaten / Kota Provinsi Aceh*. Aceh Dalam Angka.
- BPS. (2022-2021). *PDBR ADHK Kabupaten Bireuen*. Bireuen Dalam Angka.
- Dolorosa, E., Hajeri., & Yurisinthae. E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 04 (02), 253-269.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hajeri., Yurisinthae. E., & Dolorosa. E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4 (2), 253-269.
- Hutabarat, R, Y. (2020). Penentuan Sektor Unggulan di Kepulauan Anambas. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 11 (1), 95-110.
- Jumiyanti, K, R. (2018). *Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis di Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo Development Review ,1 (1), 29-43.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Arah Pemulihan Ekonomi Semakin Kuat di Awal 2022 Akan Terus Dijaga*.
- Maspaitella, M, R., Parinussa. S. M., & Tewernussa. K. I. (2021). Applying Location Quotient and Shift-Share Analysis In Determining Leading Sectors In Teluk Bintuni Regency. *Journal of Developing Economies*, 6 (1), 55-65.
- Negara, A, K, K., & Putri. A. K. (2020). Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Taboali Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient. *Jurnal Ekonomi*, 8 (1), 24-36.
- Parera., Myrell. J. (2018). *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*. Purwokerta: CV-IRDH.
- Rachibini., Didik. J. (2001). *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saharuddin., & Syahrul. (2006). Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, 3 (1), 11-24.
- Salakory, H, S, M., & Matulesy. F. S. (2020). Analisis Shift-Share Terhadap Perekonomian Kota Sorong. *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14 (4), 575-586.

- Sasmita., Adi. R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sirojuzilam. (2010). *Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.
- Sjafrijal. (2008).. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Bduose Media.
- Sjafrijal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subandi. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: alfabeta.
- Sujarweni, V., Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2015). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukirno., Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI Bima Grafika.
- Sukirno., Sadono . (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suwandi. (2017). *Desentralisasi Fiscal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja*,

Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.

Suyanto. (2000). *Analisis Ekonomi Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri.* Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS.

Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional / Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, R. (2014). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Teguh., Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Todaro, M. (2001). *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. (2010). *Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan.* Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (2004). Otonominasi Daerah.

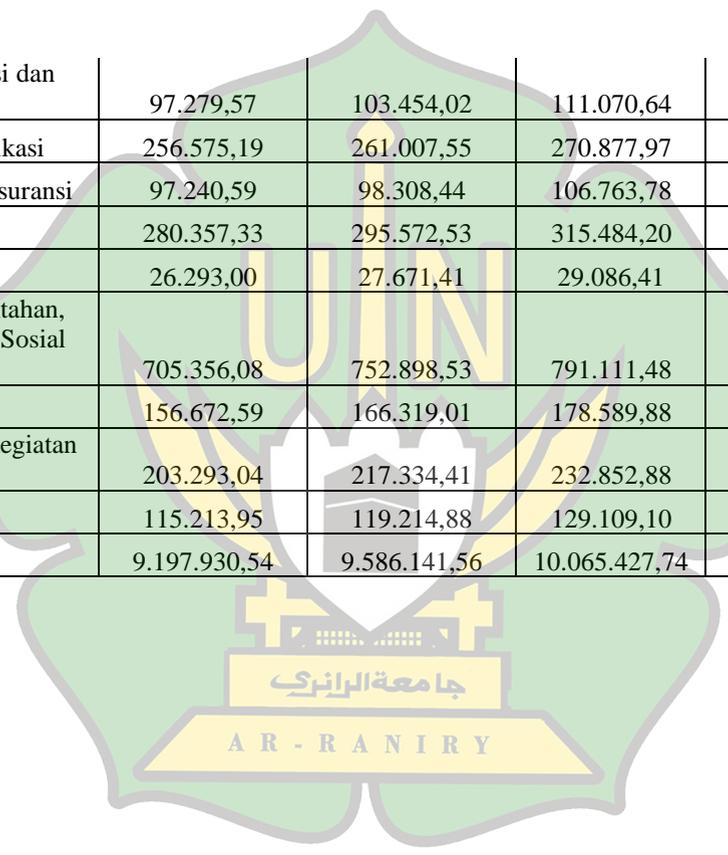
Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah).* Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Lampiran 1.

Data PDRB Kabupaten Bireuen ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2021

SEKTOR EKONOMI	PDRB ADHK 2010 KABUPATEN BIREUEN				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.840.759,02	2.917.977,13	3.043.425,28	3.161.075,70	3140368,14
B. Pertambangan dan Penggalian	231.635,34	217.436,67	220.443,25	226.977,51	243.006,42
C. Industri Pengolahan	144.587,16	150.484,37	153.683,94	149.177,44	150.235,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.934,99	8.691,38	9.556,03	10.287,99	10.662,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.020,80	4.335,06	5.227,65	5.266,11	5.387,08
F. Konstruksi	799.994,52	851.449,15	907.229,35	964.508,97	974.255,32
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.331.093,59	2.486.090,21	2.620.664,14	2.490.311,29	2.603.708,90
H. Transportasi dan Pergudangan	899.623,77	907.896,82	940.251,76	740.854,42	927.497,40

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.279,57	103.454,02	111.070,64	107.045,27	107.251,69
J. Informasi dan Komunikasi	256.575,19	261.007,55	270.877,97	302.995,00	327.945,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	97.240,59	98.308,44	106.763,78	109.718,03	108.318,01
L. Real Estate	280.357,33	295.572,53	315.484,20	313.737,44	323.468,06
M N. Jasa Perusahaan	26.293,00	27.671,41	29.086,41	30.016,06	30.593,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705.356,08	752.898,53	791.111,48	790.062,61	831.152,71
P. Jasa Pendidikan	156.672,59	166.319,01	178.589,88	183.001,88	185.848,52
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.293,04	217.334,41	232.852,88	246.846,08	271.118,22
R,S,T,U. Jasa Lainnya	115.213,95	119.214,88	129.109,10	130.697,14	133.661,58
PDRB	9.197.930,54	9.586.141,56	10.065.427,74	9.962.578,95	10.374.479,90



Lampiran 1.

Data PDRB Provinsi Aceh ADHK 2010 menurut lapangan usaha (milyar rupiah), 2017-2021

SEKTOR EKONOMI	PDRB ADHK 2010 PROVINSI ACEH				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.052.849,69	35.426.160,89	36.626.711,53	37.899.516,74	37.768.075,79
B. Pertambangan dan Penggalian	8.581.296,58	9.152.505,80	9.688.837,09	10.485.331,42	10.385.698,66
C. Industri Pengolahan	5.921.439,21	6.410.262,95	6.339.510,29	6.058.651,82	6.212.088,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	183.981,79	197.867,55	211.485,51	217.370,93	216.905,40
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.755,81	41.541,90	51.596,46	50.114,50	51.384,98
F. Konstruksi	1.1631.121,60	11.949.476,38	12.566.589,31	1.390.0437,92	13.837.071,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.962.351,25	19.730.312,08	20.324.490,32	19.238.225,08	20.051.152,97
H. Transportasi dan Pergudangan	9.328.492,30	9.577.626,56	9.861.282,06	7.056.686,62	8.433.303,40

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.544.945,37	1.672.914,05	1.785.442,75	1.649.236,89	1.548.498,33
J. Informasi dan Komunikasi	4.305.402,19	4.401.241,37	4.632.574,78	5.187.367,38	5.580.292,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.063.196,60	2.081.247,09	2.342.969,55	2.355.954,79	2.236.321,67
L. Real Estate	4.860.859,15	5.156.645,15	5.510.998,28	5.445.678,21	5.666.649,17
M,N. Jasa Perusahaan	769.830,69	820.692,64	868.548,70	840.807,26	842.987,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.807.847,11	11.486.169,89	11.851.143,69	11.459.041,15	12.190.187,53
P. Jasa Pendidikan	3.009.109,96	3.248.116,57	3.529.028,38	3.651.645,76	3.696.475,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.509.135,65	3.712.298,46	3.991.557,57	4.170.438,15	4.575.346,61
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.670.363,77	1.759.412,10	1.886.804,53	1.914.462,53	1.957.153,42
PDRB	121.240.978,72	126.824.491,42	132.069.570,80	131.580.967,16	135.249.593,84

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 2.
Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2017

Sektor Ekonomi	PDRB Bireuen	Total PDRB Bireuen	PDRB Aceh	Total PDRB Aceh	LQ 2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.840.759,02	9.197.930,54	34.052.849,69	121.240.978,7	1,09961395
B. Pertambangan dan Penggalian	231.635,34	9.197.930,54	8.581.296,58	121.240.978,7	0,35580432
C. Industri Pengolahan	144.587,16	9.197.930,54	5.921.439,21	121.240.978,7	0,32185611
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.934,99	9.197.930,54	183.981,79	121.240.978,7	0,5685005
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.020,80	9.197.930,54	38.755,81	121.240.978,7	1,36752401
F. Konstruksi	799.994,52	9.197.930,54	11.631.121,60	121.240.978,7	0,90661881
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.331.093,59	9.197.930,54	18962351,25	121.240.978,7	1,62041715
H. Transportasi dan Pergudangan	899.623,77	9.197.930,54	9328492,30	121.240.978,7	1,27118504

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.279,57	9.197.930,54	1.544.945,37	121.240.978,7	0,82998037
J. Informasi dan Komunikasi	256.575,19	9.197.930,54	4.305.402,19	121.240.978,7	0,78552541
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	97.240,59	9.197.930,54	2.063.196,60	121.240.978,7	0,62124983
L. Real Estate	280.357,33	9.197.930,54	4.860.859,15	121.240.978,7	0,76025308
M,N. Jasa Perusahaan	26.293,00	9.197.930,54	769.830,69	121.240.978,7	0,45019869
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705.356,08	9.197.930,54	10.807.847,11	121.240.978,7	0,86025762
P. Jasa Pendidikan	156.672,59	9.197.930,54	3.009.109,96	121.240.978,7	0,68630043
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.293,04	9.197.930,54	3.509.135,65	121.240.978,7	0,76362768
R,S,T,U. Jasa Lainnya	115.213,95	9.197.930,54	1.670.363,77	121.240.978,7	0,9091872

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3.
Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2018

Sektor Ekonomi	PDRB Bireuen	Total PDRB Bireuen	PDRB Aceh	Total PDRB Aceh	LQ 2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2917.977,13	9.586.141,56	35.426.160,89	126.824.491,4	1,089725427
B. Pertambangan dan Penggalan	217.436,67	9.586.141,56	9.152.505,80	126.824.491,4	0,314305562
C. Industri Pengolahan	150.484,37	9.586.141,56	6.410.262,95	126.824.491,4	0,310580969
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.691,38	9.586.141,56	197.867,55	126.824.491,4	0,581130211
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.335,06	9.586.141,56	41.541,90	126.824.491,4	1,38060057
F. Konstruksi	851.449,15	9.586.141,56	11.949.476,38	126.824.491,4	0,942690504
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.486.090,21	9.586.141,56	19.730.312,08	126.824.491,4	1,667025412

H. Transportasi dan Pergudangan	907.896,82	9.586.141,56	9.577.626,56	126.824.491,4	1,254116515
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103.454,02	9.586.141,56	1.672.914,05	126.824.491,4	0,818150187
J. Informasi dan Komunikasi	261.007,55	9.586.141,56	4.401.241,37	126.824.491,4	0,784579895
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	98.308,44	9.586.141,56	2.081.247,09	126.824.491,4	0,624922919
L. Real Estate	295.572,53	9.586.141,56	5.156.645,15	126.824.491,4	0,758326292
M,N. Jasa Perusahaan	27.671,41	9.586.141,56	820.692,64	126.824.491,4	0,446077216
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	752.898,53	9.586.141,56	11.486.169,89	126.824.491,4	0,867202468
P. Jasa Pendidikan	166.319,01	9.586.141,56	3.248.116,57	126.824.491,4	0,677438033
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217.334,41	9.586.141,56	3.712.298,46	126.824.491,4	0,774541868
R,S,T,U. Jasa Lainnya	119.214,88	9.586.141,56	1.759.412,10	126.824.491,4	0,896441973

Lampiran 4.
Hasil Analisis *Location Quotient* 2019

Sektor Ekonomi	PDRB Bireuen	Total PDRB Bireuen	PDRB Aceh	Total PDRB Aceh	LQ 2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.043.425,28	10.065.427,74	36.626.711,53	132.069.570,8	1,090272974
B. Pertambangan dan Penggalan	220.443,25	10.065.427,74	9.688.837,09	132.069.570,8	0,298535294
C. Industri Pengolahan	153.683,94	10.065.427,74	6.339.510,29	132.069.570,8	0,318085085
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.556,03	10.065.427,74	211.485,51	132.069.570,8	0,592880844
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.227,65	10.065.427,74	51.596,46	132.069.570,8	1,32940445
F. Konstruksi	907.229,35	10.065.427,74	12.566.589,31	132.069.570,8	0,947262186
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.620.664,14	10.065.427,74	20.324.490,32	132.069.570,8	1,691851472

H. Transportasi dan Pergudangan	940.251,76	10.065.427,74	9.861.282,06	132.069.570,8	1,251069122
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	111.070,64	10.065.427,74	1.785.442,75	132.069.570,8	0,816251282
J. Informasi dan Komunikasi	270.877,97	10.065.427,74	4.632.574,78	132.069.570,8	0,767223291
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	106.763,78	10.065.427,74	2.342.969,55	132.069.570,8	0,597899002
L. Real Estate	315.484,20	10.065.427,74	5.510.998,28	132.069.570,8	0,751134776
M,N. Jasa Perusahaan	29.086,41	10.065.427,74	868.548,70	132.069.570,8	0,439406501
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	791.111,48	10.065.427,74	11.851.143,69	132.069.570,8	0,875886745
P. Jasa Pendidikan	178.589,88	10.065.427,74	3.529.028,38	132.069.570,8	0,664006339
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	232.852,88	10.065.427,74	3.991.557,57	132.069.570,8	0,765437522
R,S,T,U. Jasa Lainnya	129.109,10	10.065.427,74	1.886.804,53	132.069.570,8	0,897843152

Lampiran 5.
Hasil Analisis Location Quotient Tahun 2020

Sektor Ekonomi	PDRB Bireuen	Total PDRB Bireuen	PDRB Aceh	Total PDRB Aceh	LQ 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.161.075,70	9.962.578,95	37.899.516,74	131.580.967,2	1,101596436
B. Pertambangan dan Penggalan	226.977,51	9.962.578,95	10.485.331,42	131.580.967,2	0,28590514
C. Industri Pengolahan	149.177,44	9.962.578,95	6.058.651,82	131.580.967,2	0,32519844
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.287,99	9.962.578,95	217.370,93	131.580.967,2	0,625101251
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.266,11	9.962.578,95	50.114,50	131.580.967,2	1,387866916
F. Konstruksi	964.508,97	9.962.578,95	13.900.437,92	131.580.967,2	0,916429555
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.490.311,29	9.962.578,95	19.238.225,08	131.580.967,2	1,709660722
H. Transportasi dan Pergudangan	740.854,42	9.962.578,95	7.056.686,62	131.580.967,2	1,386606856

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.045,27	9.962.578,95	1.649.236,89	131.580.967,2	0,857246538
J. Informasi dan Komunikasi	302.995,00	9.962.578,95	5.187.367,38	131.580.967,2	0,771453499
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	109.718,03	9.962.578,95	2.355.954,79	131580967,2	0,61508105
L. Real Estate	313.737,44	9.962.578,95	5.445.678,21	131580967,2	0,76091417
M,N. Jasa Perusahaan	30.016,06	9.962.578,95	840.807,26	131580967,2	0,471496562
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	790.062,61	9.962.578,95	11.459.041,15	131580967,2	0,910614431
P. Jasa Pendidikan	183.001,88	9.962.578,95	3.651.645,76	131580967,2	0,661893641
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246.846,08	9.962.578,95	4.170.438,15	131580967,2	0,781746325
R,S,T,U. Jasa Lainnya	130.697,14	9.962.578,95	1.914.462,53	131580967,2	0,901655241

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Lampiran 6.
Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2021

Sektor Ekonomi	PDRB Bireuen	Total PDRB Bireuen	PDRB Aceh	Total PDRB Aceh	LQ 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.140.368,14	10.374.479,9	37.768.075,79	135.249.593,8	1,08399016
B. Pertambangan dan Penggalian	243.006,42	10.374.479,9	10.385.698,66	135.249.593,8	0,305036399
C. Industri Pengolahan	150.235,16	10.374.479,9	6.212.088,19	135.249.593,8	0,315285216
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.662,99	10.374.479,9	216.905,40	135.249.593,8	0,640882295
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.387,08	10.374.479,9	51.384,98	135.249.593,8	1,366743034
F. Konstruksi	974.255,32	10.374.479,9	13.837.071,93	135.249.593,8	0,917906031
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.603.708,90	10.374.479,9	20.051.152,97	135.249.593,8	1,69286651

H. Transportasi dan Pergudangan	927.497,40	10.374.479,9	8.433.303,40	135.249.593,8	1,433786913
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.251,69	10.374.479,9	1.548.498,33	135.249.593,8	0,902948621
J. Informasi dan Komunikasi	327.945,83	10.374.479,9	55.80.292,63	135.249.593,8	0,76615171
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	108.318,01	10.374.479,9	2.236.321,67	135.249.593,8	0,631445738
L. Real Estate	323.468,06	10.374.479,9	5.666.649,17	135.249.593,8	0,74417438
M,N. Jasa Perusahaan	30.593,90	10.374.479,9	842.987,55	135.249.593,8	0,473133085
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831.152,71	10.374.479,9	12.190.187,53	135.249.593,8	0,888873737
P. Jasa Pendidikan	185.848,52	10.374.479,9	3.696.475,61	135.249.593,8	0,655452007
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271.118,22	10.374.479,9	4.575.346,61	135.249.593,8	0,77251041
R,S,T,U. Jasa Lainnya	133.661,58	10.374.479,9	1.957.153,42	135.249.593,8	0,890330714

Lampiran 8.
Perhitungan *National Share*

Sektor Ekonomi	(A)	(B)	(C) = (A) X (B)	<i>National Share</i> (c) - (a)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.840.759,02	1,1155	3.168.866,69	328.107,67
B. Pertambangan dan Penggalian	231.635,34	1,1155	258.389,22	26.753,88
C. Industri Pengolahan	144.587,16	1,1155	161.286,98	16.699,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.934,99	1,1155	8.851,48	916,49
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.020,80	1,1155	4.485,20	464,40
F. Konstruksi	799.994,52	1,1155	892.393,89	92.399,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.331.093,59	1,1155	2.600.334,90	269.241,31
H. Transportasi dan Pergudangan	899.623,77	1,1155	1.003.530,32	103.906,55

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.279,57	1,1155	108.515,36	11.235,79
J. Informasi dan Komunikasi	256.575,19	1,1155	286.209,62	29.634,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	97.240,59	1,1155	108.471,88	11.231,29
L. Real Estate	280.357,33	1,1155	312.738,60	32.381,27
M,N. Jasa Perusahaan	26.293,00	1,1155	29.329,84	3.036,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705.356,08	1,1155	786.824,71	81.468,63
P. Jasa Pendidikan	156.672,59	1,1155	174.768,27	18.095,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.293,04	1,1155	226.773,39	23.480,35
R,S,T,U. Jasa Lainnya	115.213,95	1,1155	128.521,16	13.307,21
PDRB	9.197.930,54	18,9635	174.424.955,80	165.227.025,26

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 7.
Perhitungan *Proportional Share*

Sektor Ekonomi	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) - (c)	Proportional Share (a) x (d)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.840.759,02	1,1091	1,1155	-0,0064	-18.175,84
B. Pertambangan dan Penggalian	231.635,34	1,2103	1,1155	0,0948	21.952,43
C. Industri Pengolahan	144.587,16	1,0491	1,1155	-0,0664	-9.602,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.934,99	1,1790	1,1155	0,0635	503,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.020,80	1,3259	1,1155	0,2104	845,84
F. Konstruksi	799.994,52	1,1897	1,1155	0,0742	59.327,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.331.093,59	1,0574	1,1155	-0,0581	-135.391,94
H. Transportasi dan Pergudangan	899.623,77	0,9040	1,1155	-0,2115	-190.237,02

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.279,57	1,0023	1,1155	-0,1132	-11.012,07
J. Informasi dan Komunikasi	256.575,19	1,2961	1,1155	0,1806	46.341,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	97.240,59	1,0839	1,1155	-0,0316	-3.071,72
L. Real Estate	280.357,33	1,1658	1,1155	0,0503	14.093,87
M,N. Jasa Perusahaan	26.293,00	1,0950	1,1155	-0,0205	-538,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705.356,08	1,1279	1,1155	0,0124	8.747,51
P. Jasa Pendidikan	156.672,59	1,2284	1,1155	0,1129	17.692,76
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.293,04	1,3038	1,1155	0,1883	38.287,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	115.213,95	1,1717	1,1155	0,0562	6.474,21
PDRB	9.197.930,54	1,1155	18,9635	-17,8480	-164.164.263,55

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Lampiran 8.
Perhitungan *Differential Shift*

Sektor Ekonomi	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) x (c)	Differential Shift (a) - (d)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.140.368,14	1,1091	2.840.759,02	31.50.690,85	-10.322,71
B. Pertambangan dan Penggalian	243.006,42	1,2103	231.635,34	280.341,65	-37.335,23
C. Industri Pengolahan	150.235,16	1,0491	144.587,16	151.684,10	-1.448,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.662,99	1,1790	7.934,99	9.354,96	1.308,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.387,08	1,3259	4.020,80	5.331,04	56,04
F. Konstruksi	974.255,32	1,1897	799.994,52	951.720,92	22.534,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.603.708,90	1,0574	2.331.093,59	2.464.942,96	138.765,94

H. Transportasi dan Pergudangan	927.497,40	0,9040	899.623,77	813.293,29	114.204,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.251,69	1,0023	97.279,57	97.503,29	9.748,40
J. Informasi dan Komunikasi	327.945,83	1,2961	256.575,19	332.550,73	-4.604,90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	108.318,01	1,0839	97.240,59	105.400,15	2.917,86
L. Real Estate	323.468,06	1,1658	280.357,33	326.832,48	-3.364,42
M,N. Jasa Perusahaan	30.593,90	1,0950	26.293,00	28.791,62	1.802,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831.152,71	1,1279	705.356,08	795.572,22	35.580,49
P. Jasa Pendidikan	185.848,52	1,2284	156.672,59	192.461,03	-6.612,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271.118,22	1,3038	203.293,04	265.061,32	6.056,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	133.661,58	1,1717	115.213,95	134.995,37	-1.333,79
PDRB	10.374.479,90	1,1155	9.197.930,54	10.260.692,24	113.787,66